

**PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN MENURUT
UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN No. 36 TAHUN 2008
DAN PRAKTIK *EARNINGS MANAGERMENTS***

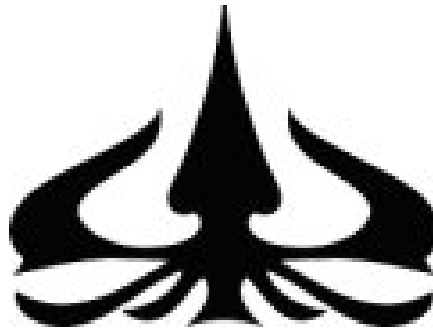
Tesis

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam Akuntansi**

Oleh :

Eddy Joni

123100024



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRISAKTI**

2012

**CORPORATE INCOME TAX RATE CHANGES
ACCORDING TO THE INCOME TAX LAW NO. 36 OF 2008
AND EARNINGS MANAGEMENT PRACTICES**

A Thesis

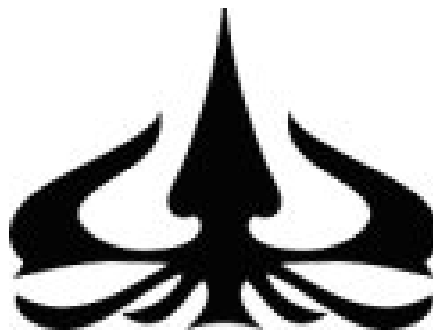
Submitted in Partial Fulfillment of Requirements

For The Degree of Master Accounting

By

Eddy Joni

123100024



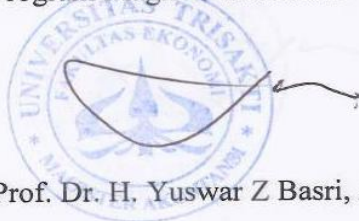
**MASTER ACCOUNTING
POSTGRADUATE FACULTY OF ECONOMIC
UNIVERSITY OF TRISAKTI**

2012

Lembar Persetujuan Tesis

Nama Mahasiswa : Eddy Joni
Nomor Mahasiswa : 123100024
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tesis : Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan Praktik *Earnings Management*

Diketahui oleh,
Dekan
Pelaksana Tugas
Program Magister Akuntansi



Prof. Dr. H. Yuswar Z Basri, Ak, MBA

Disetujui oleh,
Pembimbing Tesis



Dr. Salip, MSc., Ak.

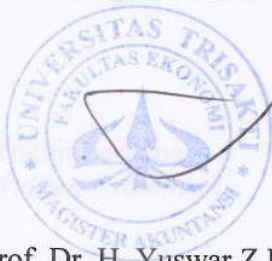
University of Trisakti
Faculty of Economic
Postgraduate Accounting Program

Thesis Approval

Name Mahasiswa : Eddy Joni
Nomor Mahasiswa : 123100024
Program Studi : Magister Akuntansi
Konentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tesis : Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan Praktik Manajemen Laba pada Hari Selasa Tanggal 12 Maret 2012

Name : Eddy Joni
NIM : 123100024
Study Program : Master of Accounting
Concentration : Tax Accounting
Thesis Title : Corporate Income Tax Rate Changes According to the Income Tax Law No. 36 of 2008 and Earnings Management Practices

Acknowledged by,
Dean
Executive Head
Master Degree in Accounting Program



Prof. Dr. H. Yuswar Z Basri, Ak, MBA

Approved by,
Thesis Advisor

Dr. Salip, MSc., Ak.

Jakarta, Maret 2012

Mengetahui

Dekan

Pelaksana Tugas


Program Magister Akuntansi

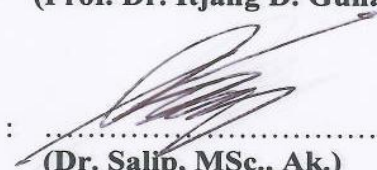
Lembar Persetujuan Tesis


Nama Mahasiswa : Eddy Joni
Nomor Mahasiswa : 123100024
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tesis : Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan Praktik *Earnings Management*

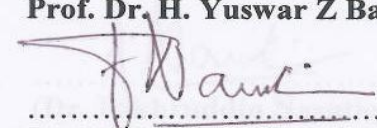
Telah diuji dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji pada hari Selasa Tanggal 6 Maret 2012.

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : 
(Prof. Dr. Itjang D. Gunawan, Ak, MBA)

Pembimbing Tesis : 
(Dr. Salip, MSc., Ak.)

Penguji Pertama
(Written Examiner) : 
Prof. Dr. H. Yuswar Z Basri, Ak, MBA

Penguji Kedua
(Oral Examiner) : 
Dr. Fakhruddin Nasution, SE, MM

Jakarta, Maret 2012
Mengetahui
Dekan
Pelaksana Tugas
Program Magister Akuntansi


(Prof. Dr. H. Yuswar Z Basri, Ak, MBA)

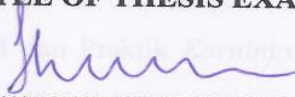
University of Trisakti
Faculty of Economic
Postgraduate Accounting Program

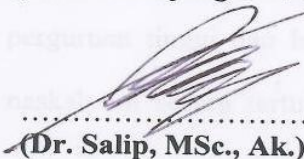
Thesis Approval


Name : Eddy Joni
NIM : 123100024
Study Program : Master of Accounting
Concentration : Tax Accounting
Thesis Title : Corporate Income Tax Rate Changes According to the Income Tax Law No. 36 of 2008 and Earnings Management Practices

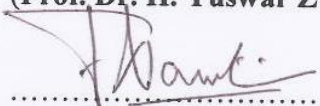
It has been tested and passed in front of the Team of Examiners on Tuesday March 6, 2012

COMMITTEE OF THESIS EXAMINERS

Chairman : 
(Prof. Dr. Itjang D. Gunawan, Ak, MBA)

Thesis Advisor : 
(Dr. Salip, MSc., Ak.)

Written Examiner : 
(Prof. Dr. H. Yuswar Z Basri, Ak, MBA)

Oral Examiner : 
(Dr. Fakhruddin Nasution, SE, MM)

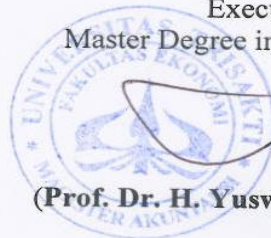
Jakarta, March ,2012

Acknowledge by.

Dean

Executive Head

Master Degree in Accounting Program



(Prof. Dr. H. Yuswar Z Basri, Ak, MBA)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eddy Joni

NIM : 123100024

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya ajukan ini dengan judul “Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan Praktik *Earnings Management*” adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan bukan plagiat atas penelitian lain kecuali yang diacu dalam naskah ini secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta , 12 Maret 2012



Eddy Joni

ABSTRAKSI

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji praktik manajemen laba sebelum dan sesudah perubahan tarif PPh Wajib Pajak Badan dengan berlakunya UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Manajemen laba di dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu *discretionary accrual* dan *deferred Tax*. Lebih lanjut penelitian ini akan menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu variabel insentif pajak dengan proksi perencanaan pajak dan non insentif pajak dengan proksi *earning pressure*, tingkat utang, kualitas audit, *growth*, dan profitabilitas.

Penelitian ini menggunakan sebanyak 51 perusahaan *profit* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2007 – 2010. Total pengamatan di dalam penelitian ini sebanyak 204 tahun laporan keuangan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Perusahaan tidak melakukan manajemen laba sebagai respon perubahan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan di Indonesia; (2) variabel insentif pajak dan insentif non pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*. Dari beberapa variabel tersebut secara parsial hanya *earnings pressure* berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*; (3) variabel insentif pajak dan insentif non pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *deferred Tax*. Dari beberapa variabel tersebut secara parsial hanya *earning pressure*, tingkat utang, dan profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*.

Kata kunci: perubahan tarif PPh Wajib Pajak Badan, manajemen laba, insentif pajak dan insentif non pajak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan anugerah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Akuntansi (M.Si.) pada Program Pasca Sarjana Universitas Trisakti.

Berhasilnya penyusunan Tesis ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu dengan segala ketulusan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Yuswar Zainul Basri, Ak, MBA, selaku Dekan, Pelaksana Tugas Program Magister Akuntansi Universitas Trisakti dan *written examiner* penulis, atas kebaikan dan kesabaran Beliau dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap, MAcc (Alm) selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Trisakti periode sebelumnya, yang banyak memberikan bekal pengetahuan akuntansi kepada penulis.
3. Drs Hermi, Ak. Msi. Selaku Sekretaris Program Magister Akuntansi Universitas Trisakti.
4. Dr Salip, Ak. Msc. selaku Pembimbing Tesis, yang banyak memberikan bekal pengetahuan perpajakan kepada penulis serta atas semua waktu, kebaikan, ketekunan dan kesabaran Beliau dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. Itjang D. Gunawan, Ak, MBA selaku Ketua Sidang Penguji Tesis.
6. Dr. Fakhruddin Nasution, SE, MM. selaku anggota Penguji Tesis kedua.
7. Para Dosen yang mengajar di Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Trisakti atas semua ilmu dan didikanya selama penulis kuliah.
8. Rekan-rekan Magister Akuntansi Angkatan 18 yang telah bersama-sama menempuh pendidikan dan saling mendukung dalam proses belajar. *Special Thanks to* Devid, Pak Budi, Agung, Bayu, Citra, Priska, Putri, Ira, Isabella, Ci Yenti, Feranika Husodo, Asti, Natali, Dwi Budi, Budi, Amir, Aan, Ay, Novia, Rere, Vanessa, Yessa, Agustine, Mas Iqbal, Bu Nila dan lain-lain.
9. Rekan-rekan kerja penulis yang telah membantu dalam memberikan semangat selama penulis kuliah. *Special Thanks to* Ci Sumiyati, Willibrordus, H. Fian S..

10. Staf Administrasi Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Trisakti yang telah banyak membantu penulis selama studi. *Special Thanks to* Pak Asep, Mas Aan, Mas Aswan.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya yang telah membantu penulis selama penulisan tesis ini.
12. Khusus buat Kedua Orang Tua , Saudara (Hemy, Suyanti dan Suhandi) dan Sepupu Penulis (Tony), atas doa dan dorongannya yang diberikan selama ini.

Semoga apa yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut di atas akan mendapatkan amal dan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Maret 2012

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan antara Fraud dan Earnings Management	28
Tabel 2.2. Perbedaan Tarif UU PPh 1983, 1994, 2000, dan 2008 untuk Wajib Pajak Badan	42
Tabel 3.1. Pemilihan Sampel Penelitian.....	56
Tabel 3.2. Sampel Penelitian.....	57
Tabel 4.1. Deskriptive Statistik.....	70
Tabel 4.2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test <i>discretionary accrual</i> (DA)	70
Tabel 4.3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test <i>deferred tax</i> (DT)	71
Tabel 4.4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test <i>Standardized Residual</i> <i>discretionary accrual</i> (DA) dan <i>deferred tax</i> (DT).....	72
Tabel 4.5. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test <i>Standardized Residual</i> <i>deferred tax</i> (DT)	73
Tabel 4.6. Model Regresi Pertama	74
Tabel 4.7. Model Regresi Kedua.....	74
Tabel 4.8. Uji Autokolerasi	75
Tabel 4.9. AkruaI 2007	77
Tabel 4.10. AkruaI 2008.....	77
Tabel 4.11. AkruaI 2009	78
Tabel 4.12. AkruaI 2010.....	78
Tabel 4.13. Uji Beda <i>discretionary accrual</i> (DA)	81
Tabel 4.14. Uji Beda <i>deferred tax</i> (DT)	84
Tabel 4.15. Hasil Pengujian Regresi Berganda Secara Parsial	88
Tabel 4.16. Hasil Pengujian Regresi Berganda Secara Global	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual DA	71
Gambar 4.3.	Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual DT	72
Gambar 4.3.	Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual DT	73
Gambar 4.4.	Scatterplot Model Pertama	76
Gambar 4.5.	Scatterplot Model Kedua	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.a. Data Perhitungan Total Akrual dan Variabel Penelitiannya tahun 2007
- Lampiran 1.b. Data Perhitungan Total Akrual dan Variabel Penelitiannya tahun 2008
- Lampiran 1.c. Data Perhitungan Total Akrual dan Variabel Penelitiannya tahun 2009
- Lampiran 1.d. Data Perhitungan Total Akrual dan Variabel Penelitiannya tahun 2010
- Lampiran 1.e. Data Perhitungan *Tax Planning*
- Lampiran 2.a. Data Perhitungan *discretionary accrual* (DA) tahun 2007
- Lampiran 2.b. Data Perhitungan *discretionary accrual* (DA) tahun 2008
- Lampiran 2.c. Data Perhitungan *discretionary accrual* (DA) tahun 2009
- Lampiran 2.d. Data Perhitungan *discretionary accrual* (DA) tahun 2010
- Lampiran 3. Data *discretionary accrual* (DA) dan *deferred tax* (DT)
- Lampiran 4.a. Data Regresi *discretionary accrual* (DA) dan *deferred tax* (DT)
- Lampiran 4.b. Data Regresi *deferred tax* (DT)
- Lampiran 5.a. Statistik Deskriptif
- Lampiran 5.b. Uji Normalitas Data
- Lampiran 5.c. Uji Beda t-test
- Lampiran 5.d. Uji Wilcoxon Signed Ranks Test
- Lampiran 5.e.1. Uji Regresi Berganda *Accrual* Tahun 2007
- Lampiran 5.e.2. Uji Regresi Berganda *Accrual* Tahun 2008
- Lampiran 5.e.3. Uji Regresi Berganda *Accrual* Tahun 2009
- Lampiran 5.e.4. Uji Regresi Berganda *Accrual* Tahun 2010
- Lampiran 5.e.5. Uji Asumsi Klasik *Accrual* Tahun 2007 sampai Tahun 2010
- Lampiran 5.f. Uji Regresi Berganda Model *discretionary accrual* (DA)
- Lampiran 5.g. Uji Regresi Berganda *deferred tax* (DT)

Lampiran 5.h. Uji Regresi Berganda *deferred tax* (DT) kedua

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	12
2.1. Tinjauan Pustaka	12
2.1.1. Teori <i>Agency</i>	12
2.1.2. Manajemen Laba	14
2.1.3. Motivasi Manajemen Laba.....	15
2.1.4. Teknik-Teknik Manajemen Laba	20

2.1.5.	Perbedaan Manajemen Laba dengan <i>Financial Fraud</i>	27
2.1.6.	Pengertian Akrua.....	29
2.1.7.	Pajak Tangguhan	31
2.1.8.	Pengertian Laba (<i>Income</i>)	38
2.1.9.	Perubahan Tarif PPh Badan Menurut UU Perpajakan di Indonesia	40
2.2.	Penelitian Sebelumnya	43
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	46
2.4.	Perumusan Hipotesis	52
BAB III	METODE PENELITIAN.....	55
3.1.	Desain Penelitian.....	55
3.1.1.	Jenis Penelitian.....	55
3.1.2.	Tujuan Penelitian.....	55
3.1.3.	Unit Analisis.....	56
3.1.4.	Horizon Waktu	56
3.1.5.	Lingkungan Studi	56
3.2.	Populasi dan Sampel	57
3.3.	Metode Pengumpulan Data	59
3.4.	Identifikasi dan Pengukuran Variabel	60
3.5.	Model Penelitian	64
3.6.	Teknik Analisis	65

3.6.1.	Pengujian Normalitas Data.....	65
3.6.2.	Pengujian Asumsi Model Regresi Linier Berganda	65
3.6.3.	Model Pengujian Hipotesis	67
BAB IV	ANALISA DAN PEMBAHASAN	70
4.1.	Statistik Deskriptif.....	70
4.2.	Uji Normalitas Data	71
4.3.	Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	75
4.4.	Hasil Pengujian Hipotesis	77
4.4.1.	Pengujian Pertama.....	77
4.4.2.	Pengujian Kedua.....	88
BAB V	KESIMPULAN IMPLIKASI.....	97
5.1.	Kesimpulan.....	97
5.2.	Keterbatasan	99
5.3.	Implikasi.....	100
	DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Konflik antara manajemen dengan pemerintah biasanya timbul dalam hal perpajakan. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk memungut pajak setinggi mungkin (merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah), sedangkan manajemen sebagai pihak yang melakukan pembayaran sudah tentu ingin membayar pajak sekecil mungkin. Apabila beban pajak tersebut dirasakan terlalu berat bagi perusahaan, maka dapat mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi data laba perusahaan.

Pada tahun 2008, bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah telah merevisi beberapa Undang-undang perpajakan. Revisi tersebut meliputi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) (Nasution, 2009). Reformasi Pajak Penghasilan tahun 2008, merupakan reformasi keempat atas UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 dan sekarang dalam UU No. 36 tahun 2008.

Melalui UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha. Hal ini dapat mendorong para pengusaha untuk bersaing lebih kompetitif. Insentif dimaksud adalah dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan yang dikenai tarif 28 % mulai berlaku pada tahun fiskal 2009 dan akan menjadi 25 % mulai berlaku pada tahun fiskal 2010. Tarif PPh ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib Pajak badan tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.

Dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan mengalami penurunan (28 % dari penghasilan kena pajak pada tahun fiskal 2009 dan 25 % dari penghasilan kena pajak mulai tahun fiskal 2010), tetapi dengan penurunan tersebut apakah akan membawa dampak bagi perusahaan untuk tidak melakukan manajemen laba? Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena pada dasarnya semua perusahaan mengharapkan keuntungan yang optimal dan laporan keuangannya terlihat bagus.

Jika perusahaan memandang momen tersebut sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, mestinya perusahaan akan menunda pengakuan laba/mempercepat pengakuan biaya pada tahun sebelumnya sehingga laba tahun 2009 dan 2010 menjadi tinggi. Dengan cara ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan

sebesar penurunan tarif pajak kali besarnya laba yang ditunda. Studi terdahulu membuktikan bahwa pajak dapat menjadi salah satu insentif manajer melakukan manajemen laba (Frankel dan Trezervant, 1994).

Income taxation dapat memberikan motivasi manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau *earning management*. Namun demikian pihak fiskus mempunyai aturan sendiri dalam mengatur pembukuan atau akuntansi untuk penghasilan kena pajak (*taxable income*), sehingga mengurangi ruang gerak manajemen perusahaan untuk melakukan *earning management*. Penelitian di Amerika banyak meneliti tentang dampak pemilihan metode penilaian persediaan LIFO dan FIFO dan pengaruhnya pada beban pajak penghasilan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Douch and Pincus (1988); Lindahl (1989); Dhaliwal, et.al (1994), Cloyd et.al. (1996) yang hasilnya menunjukkan bahwa banyak perusahaan memilih metode LIFO untuk menghemat pajak penghasilan. Kebijakan pemilihan metode penilaian persediaan LIFO tidak memungkinkan di Indonesia karena penilaian persediaan yang diperkenankan dalam peraturan perundangan perpajakan di Indonesia hanya metode FIFO dan rata-rata.

Penelitian lain yang dimotivasi pajak dilakukan oleh Guenther (1994) yang meneliti adanya *earning management* dalam merespon *Tax Reform Act* (TRA) 1986 di *United States*. Penelitian ini untuk menguji apakah ada perilaku *earning management* yang memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan TRA di US, untuk meminimumkan beban pajak penghasilan. Guenther memfokuskan pada indikasi

adanya total akrual laba akuntansi dengan membandingkan sebelum dan sesudah diberlakukannya TRA. Hasilnya gagal membuktikan bahwa penurunan tarif pajak dapat mempengaruhi kebijakan akrual laba perusahaan untuk meminimumkan beban pajak penghasilan. Sedangkan penelitian Frankel dan Trezervant (1994) memfokuskan pada satu keputusan pembelian persediaan pada akhir tahun, dengan pembelian akhir tahun dan dengan metode LIFO, akan memberikan insentif laba lebih rendah sebelum berlakunya TRA sehingga ada penghematan pajak. Selanjutnya Yin dan Cheng (2004) melakukan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994). Yin dan Cheng (2004) menguji apakah perusahaan akan melakukan manajemen laba sebagai respon atas penurunan tarif pajak badan di Amerika Serikat. Yin dan Cheng (2004) membagi sampel penelitiannya ke dalam dua kelompok, yaitu: perusahaan yang memperoleh laba (*profit firms*) dan perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firms*). Mereka menguji pengaruh dari insentif pajak dan insentif non pajak terhadap perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merespon perubahan tarif pajak. Yin dan Cheng (2004) menggunakan pendekatan *discretionary current accrual* dalam mendeteksi manajemen laba dan menemukan bukti empiris, yaitu: (1) Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) berhubungan signifikan dengan insentif pajak dan insentif non-pajak; dan (2) Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) hanya berhubungan signifikan dengan insentif non-pajak saja. Hal ini menunjukkan bahwa manajer mungkin

melakukan manajemen laba ketika perusahaan mengalami laba sehingga berupaya meminimalkan beban pajak.

Selanjutnya penelitian di Indonesia mengenai manajemen laba berkaitan dengan perubahan undang-undang pajak dilakukan oleh dilakukan oleh Setiawati (2001), oleh Hidayati dan Zulaikha (2003), Wulandari dkk (2004) dan Subagyo dan Oktavia (2010). Setiawati (2001) yang menguji apakah ada perilaku *earning management* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dalam merespon perubahan Undang-undang pajak penghasilan tahun 1994 yang mulai berlaku 1995. Dalam mendeteksi adanya *earning management*, Setiawati menggunakan pendekatan *discretionary accrual*. Hasil penelitiannya tidak dapat membuktikan adanya perilaku perusahaan terbuka yang berusaha untuk menurunkan laba pada tahun 1994 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak tahun yang bersangkutan.

Hidayati dan Zulaikha (2003) dalam penelitiannya menguji apakah dengan dikeluarkannya UU perpajakan 2000 manajer akan berusaha menunda pengakuan laba satu periode sebelum berlakunya penurunan tarif pajak baru dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar. Dalam penelitian ini Hidayati dan Zulaikha tidak berhasil membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk menurunkan laba pada tahun 2000. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2004); Subagyo dan Oktavia (2010) bertujuan untuk menemukan bukti empiris, adanya praktik manajemen laba merespon perubahan UU PPh dengan *discretionary accrual*. Wulandari dkk berhasil membuktikan bahwa perusahaan melakukan

manajemen laba untuk melakukan penghematan pajak menjelang UU perpajakan 2000. Selanjutnya Subagyo dan Oktavia (2010) melakukan penelitian praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan pada periode tahun 2008 dan 2009 atas respon perubahan undang-undang tahun 2008, hasil penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba untuk merespon perubahan undang-undang.

Beberapa penelitian manajemen laba telah menggunakan pendekatan lain yaitu pajak tangguhan (*deferred tax*) seperti yang dilakukan Holland dan Jackson (2002), Zhang (2002), Phillips et al (2003), dan Yulianti (2004). Holland dan Jackson (2002) dalam penelitiannya membuktikan bahwa terdapat perbedaan sistematis antara jumlah pajak tangguhan yang aktual dan yang ditetapkan (*deferred tax provisions*) dalam *Statement of Standard Accounting Practice 15 (SSAP 15)* tentang *Accounting for Deferred Tax*. Perbedaan itu terjadi karena manajer diijinkan untuk membuat kewenangan dalam menentukan batasan jumlah pajak tangguhan. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara *deferred tax provisions* dengan praktek manajemen laba di tahun 1991 dan 1992 pada 58 perusahaan yang menjadi sample penelitian.

Phillips, Pincus, dan Rego (2003) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba. Dalam penelitian tersebut, beban pajak tangguhan diperlakukan sebagai salah satu pengukuran *accruals* bersama-sama dengan pengukuran akrual

menurut *Modified Jones Model* (Dechow, et.al, 1995) dan pengukuran akrual menurut *Forward-Looking Jones Model* (Dechow, et.al, 2003). Penelitian terkait pajak tangguhan di Indonesia dilakukan Yulianti (2004) mengenai kemampuan beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba menunjukkan hasil yang positif dan signifikan pada hubungan antara beban pajak tangguhan dengan adanya kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari terjadinya kerugian. Penelitian tersebut merupakan replikasi atas penelitian Phillips, Pincus, dan Rego (2003).

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya maka penelitian ini melakukan pengujian kembali kekonsistenan hasil penelitian dalam mengindikasikan praktik manajemen laba sebelum dan sesudah perubahan UU PPh tahun 2008 pada perusahaan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penelitian ini juga akan menguji apakah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dimotivasi oleh insentif pajak atau insentif non pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) adalah 1) penelitian ini menguji pengamatan dari tahun 2007 sampai tahun 2010. 2) Penelitian ini juga tidak memasukan perusahaan rugi sebagai sampel karena perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) tidak perlu melakukan manajemen laba untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilannya sebab perusahaan yang mengalami kerugian tidak harus membayar pajak. Selain itu, berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, perusahaan yang mengalami kerugian boleh mengkompensasi kerugiannya maksimal

dalam kurun waktu lima tahun. 3) Selain itu penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam mendeteksi praktik manajemen laba yaitu metode akrual (*discretionary accrual*), dan pajak tangguhan (*deferred tax*).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan Praktik *Earnings Management*”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah

- a. Apakah perusahaan melakukan manajemen laba sebagai respon atas diberlakukannya perubahan tarif pajak Badan di Indonesia (UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)?
- b. Apakah insentif pajak dan insentif non pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang diukur melalui *discretionary accrual* ?
- c. Apakah insentif pajak dan insentif non pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang diukur melalui *deferred tax* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang :

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba.

- b. Praktik manajemen laba sebelum dan sesudah perubahan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat antara lain :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kajian yang sama pada penelitian selanjutnya.
- b. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai studi tentang manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak.
- c. Bagi pembuat kebijakan peraturan perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi apakah setiap adanya perubahan Undang-undang akan direspon oleh wajib pajak, sehingga pemerintah/fiskus dapat mengantisipasi perilaku wajib pajak dan pengaruhnya terhadap wajib pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara dari pajak.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian penjelasan (*explanatory research*) yang menyoroti hubungan antara variable-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang dirumuskan (Singarimbun dan Effendi, 1982). Data yang digunakan adalah data

sekunder berupa laporan keuangan periode 2007-2010 dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan telah diaudit.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kerangka teori. Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sehubungan dengan permasalahan, antara lain teori-teori yang berkaitan dengan *discretionary accruals*, pajak tangguhan dan manajemen laba.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, termasuk di dalamnya desain penelitian, pemilihan populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, Identifikasi dan pengukuran variabel, model penelitian, dan teknik analisis.

Bab IV merupakan pembahasan dan analisis dari permasalahan. Bab ini berisi hasil penelitian setelah dilakukan pengolahan data atas variabel-variabel penelitian yang digunakan, serta analisis atas hasil pengolahan data tersebut untuk menjawab permasalahan penelitian.

Bab V berisi kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian, serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi tambahan untuk meningkatkan kualitas penelitian yang sejenis di masa datang.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

Penelitian ini menjelaskan tentang Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan praktik *Earnings Management*. Sehubungan dengan itu, bab ini akan mengkaji kerangka teoritis yang berhubungan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan dan *Earnings Management*. Pembahasan di bab ini akan diawali dengan pembahasan tinjauan pustaka yang terdiri dari teori *Agency*, manajemen laba, akrual, pajak tangguhan (*deferred tax*), laba, Perubahan tarif PPh Badan menurut UU Perpajakan; penelitian sebelumnya; kerangka pemikiran dan yang terakhir perumusan hipotesis.

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Agency

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan apa saja yang harus dilakukan manajer dalam melakukan pengelolaan dana yang diinvestasikan dan pembagian *return* antara manajer dan investor.

Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya

keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan ada tiga jenis biaya keagenan yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. Principal dapat membatasi penyimpangan (*divergencies*) dari kepentingan dengan menetapkan insentif yang layak dan mengeluarkan biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dirancang untuk membatasi penyimpangan aktivitas-aktivitas yang dilakukan agen. Dalam beberapa situasi tertentu, prinsipal memungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (biaya bonding/*bonding cost*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan principal. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh principal juga merupakan biaya yang timbul dari hubungan keagenan. Biaya jenis ini disebut kerugian residual (*residual loss*).

Asumsi teori *agency* adalah bahwa masing-masing individu adalah *economic rational man* dan kontrak antara principal dan agent dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Principal termotivasi untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang semakin meningkat sedangkan agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Berdasarkan asumsi sifat manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak oportunistik yang mengutamakan kepentingan pribadinya.

Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara *principal* dan *agent* memicu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan dapat

lebih memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Cara yang dapat dilakukan agent untuk mempengaruhi angka akuntansi tersebut yaitu dengan melakukan manajemen laba.

2.1.2. Manajemen Laba

Laporan keuangan adalah cerminan dari kondisi perusahaan karena memuat informasi mengenai laporan kinerja manajemen, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga menunjukkan sejauh mana kinerja manajemen dan merupakan sumber dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Dalam laporan keuangan biasanya yang dijadikan parameter utama adalah besarnya laba perusahaan. Dengan adanya penilaian kinerja manajemen tersebut dapat mendorong timbulnya perilaku menyimpang dari pihak manajemen perusahaan yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba (*earnings management*). Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi menjadi seperti yang mereka inginkan melalui “pengelolaan” faktor internal yang dimiliki atau digunakan perusahaan.

Menurut Scott (2003:369), “*earnings management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*”. Yang artinya *earnings management* adalah pilihan yang dilakukan oleh manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu.

Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgment* dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan *stakeholder* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

2.1.3. Motivasi Manajemen Laba (*Earnings Management*)

Keuntungan atau perolehan secara akuntansi (*accounting income*) adalah penting dan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan oleh banyak pihak, misalnya investor, penyedia dana (kreditor), manajer, pemilik atau pemegang saham, dan pemerintah. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila banyak manajer mengatur data keuangan atau keuntungan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa keuntungan secara akuntansi adalah informasi yang relevan atas aliran kas perusahaan saat ini dan masa datang yang pada akhirnya dikaitkan dengan nilai perusahaan (*firm value*) (Watts dan Zimmerman, 1986).

Dalam literatur tentang aktivitas yang berkaitan dengan kontrak (*contracting activities*) menunjukkan bahwa data akuntansi memainkan peranan penting dalam banyak aspek. Data akuntansi juga memegang peranan dalam penafsiran istilah pertukaran dalam aktivitas kontrak yang menyediakan dorongan-dorongan tertentu bagi manajer untuk mengatur atau mengelola data akuntansi untuk kepentingan mereka sendiri. Di sisi lain keuntungan akuntansi (*accounting earnings*) adalah

bagian dari data akuntansi dan telah diketahui sebagai isyarat atau acuan dalam proses pengambilan keputusan serta kebijaksanaan penting bagi para pembuat dan pemakai laporan keuangan. Selain itu *accounting earnings* secara luas dipercayai sebagai informasi utama yang tersedia di dalam laporan keuangan suatu organisasi. Jadi tidak mengherankan bila banyak manajer yang mengatur keuntungan tergantung pada motivasi yang mendasari.

Dari sudut pandang teori keagenan (*agency theory*) juga ditekankan bahwa angka-angka akuntansi memainkan peranan penting dalam menekan konflik antara pemilik perusahaan dan pengelolanya atau para manajer. Jadi jelas bahwa alasan mengapa manajer memiliki motivasi untuk mengelola data keuangan, khususnya *earnings management*, yaitu untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi.

Menurut Magnan dan Comier, ada tiga sasaran yang ingin dicapai oleh manajer sehubungan dengan praktik *earnings management* (Gumanti, 2003: 24). Ketiga sasaran tersebut adalah:

- a. Minimalisasi biaya politis (*political cost motivation*)
- b. Maksimalisasi kesejahteraan manajer (*manager wealth maximization*)
- c. Minimisasi biaya finansial (*minimization of financial costs*)

Jadi jelas bahwa sasaran dari manajemen laba adalah cukup komprehensif, yaitu mencakup banyak aspek dalam perusahaan baik demi keuntungan pribadi manajer maupun perusahaan secara keseluruhan.

Watts dan Zimmerman (1986: 257-262) membagi motivasi yang mendasari manajemen laba (*earnings management*) ke dalam tiga hipotesis yaitu:

a. *Bonus plan hypothesis*

Dalam hipotesis rencana bonus, manajer akan mengatur akrual (disebut akrual diskresioner/*discretionary accruals*) untuk memaksimalkan (nilai tunai) dari bonus yang diterimanya. Jika laba perusahaan di bawah minimum bonus (*lower bound*) atau di atas batas maksimum (*upper bound*), maka manajer akan menurunkan laba dengan mengatur akrual. Sementara bila laba perusahaan berada dalam area di antara batas minimum dan batas maksimum kontrak bonus, manajer cenderung memilih akrual menaikkan laba karena adanya tambahan bonus (inkremental) untuk setiap kenaikan laba.

b. *Debt Covenant hypothesis atau leverage hypothesis*

Penjelasan hipotesis ini berkaitan dengan kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian hutang. Artinya agar perusahaan tidak terkena sanksi karena melanggar kesepakatan hutang dengan kreditur, maka manajer memilih akrual yang dapat menghindarkan perusahaan dari pelanggaran kesepakatan hutang tersebut.

c. *Political cost hypothesis*

Dalam hal ini perusahaan yang melakukan monopoli atau melanggar undang-undang *antitrust* akan memilih akrual yang menurunkan laba sehingga labanya tidak terlalu besar, yang akan diindikasikan oleh pemerintah sebagai cerminan monopoli. Dalam konsep akuntansi sendiri, laba bukanlah proksi untuk monopoli

karena tidak selalu perusahaan dengan laba tinggi menguasai pasar produk melebihi batas monopoli.

Healy dan Wahlen membagi motivasi manajemen laba ke dalam tiga kelompok (Gumanti, 2003: 24), yaitu:

a. Motivasi dari pasar modal (*capital market motivations*)

Motivasi dilakukannya manajemen laba adalah karena alasan pasar modal lebih banyak disebabkan oleh adanya anggapan umum bahwa angka-angka akuntansi, khususnya laba, merupakan salah satu sumber informasi penting yang digunakan oleh investor dalam menilai harga saham. Sehingga tidak mengherankan kalau ada sebagian manajer yang berusaha membuat laporan keuangannya agar nampak baik dengan maksud mempengaruhi kinerja saham dalam jangka pendek. Manajemen cenderung melaporkan laba bersih lebih rendah (*understate*) ketika melakukan *buyout* dan melaporkan laba lebih tinggi (*overstate*) ketika melakukan penawaran saham ke publik.

b. Motivasi kontrak (*contracting motivations*)

Motivasi kontrak atas terjadinya manajemen laba dikaitkan dengan kegunaan data akuntansi dalam membantu memonitor dan meregulasi kontrak antara perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara eksplisit maupun implisit, kontrak-kontrak yang berjenis kompensasi manajemen banyak dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Kondisi ini seakan menjadi pendorong bagi manajer untuk melakukan manajemen laba.

c. Motivasi Peraturan (*regulatory motivations*)

Bagi para penetap standar (*standard setter*), perhatian terhadap manajemen laba menjadi penting, karena manajemen laba, apapun alasannya dapat mengarah kepada penyajian laporan keuangan yang tidak benar (*misleading*) dan akhirnya dapat mempengaruhi alokasi sumber-sumber yang ada.

Menurut Scott (2003; 369-383), terdapat berbagai motivasi mengapa perusahaan, dalam hal ini manajer, melakukan *earnings management*, yaitu :

a. *Bonus Purposes*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *oportunistic* untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985).

b. *Political Motivations*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

c. *Taxation Motivations*

Perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menghasilkan laba dilaporkan lebih rendah, sehingga pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah juga menjadi lebih rendah.

d. Changes of Chief Executive Officer (CEO)

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

e. Initial Public Offerings (IPO)

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

f. To Communicate Information To Investors

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

2.1.4. Teknik-Teknik Manajemen Laba

Terdapatnya berbagai insentif yang ingin dicapai manajemen, maka bukanlah suatu yang mengherankan apabila sering kali para manajer menggunakan fleksibilitas yang terkandung di dalam akuntansi akrual agar benar-benar mampu mengatur laba. Terdapat berbagai macam teknik manajemen laba yang sering dipakai oleh manajemen untuk mengatur laba dalam memaksimalkan kepentingannya.

Menurut Stice et al (2004: 427-430) terdapat beberapa teknik umum yang sering digunakan dalam manajemen laba, antara lain:

a. Pengaitan Secara Strategis

Perusahaan dapat menentukan waktu transaksi terjadi sehingga keuntungan dan kerugian yang besar dapat terjadi dalam triwulan yang sama, hal ini memunculkan trend naik yang mulus dalam laba yang dilaporkan. Dengan menggunakan kesadaran akan manfaat yang didapat dari pencapaian target laba yang konsisten, sebuah perusahaan dapat melakukan usaha-usaha tambahan untuk memastikan bahwa transaksi penting telah diselesaikan dengan cepat atau ditunda sehingga dapat diakui pada triwulan yang paling menguntungkan.

b. Perubahan dalam Metode atau Estimasi dengan Pengungkapan Penuh

Banyak perusahaan sering mengganti estimasi akuntansinya yang berhubungan dengan piutang tak tertagih, retur atau dana pensiun, umur ekonomis aktiva, dan lain-lain. Meskipun perubahan ini merupakan suatu hal yang rutin dari penyesuaian estimasi akuntansi, namun hal ini dapat digunakan untuk mengatur jumlah laba yang dilaporkan.

c. Perubahan dalam Metode atau Estimasi dengan Pengungkapan yang Minimal atau Tanpa Pengungkapan Sama Sekali

d. Akuntansi non-GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*)

Manajemen laba dilakukan dengan tidak mengikuti GAAP yang ada, sering dianggap dengan kasus “pelaporan yang curang”. Namun akuntansi non-GAAP pun dapat terjadi akibat kesalahan yang tidak disengaja atau kurang hati-hatian.

e. Transaksi Fiktif

Manajer dapat mengatur manajemen laba dengan menggunakan transaksi yang fiktif. Contoh manajer dapat secara sembunyi-sembunyi menyewa gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan yang diretur untuk menghindari pencatatan retur penjualan.

Menurut Scott (2003: 383-384) terdapat 4 pola yang dipakai dalam manajemen laba antara lain:

a. *Taking a Bath*

Pola ini dapat terjadi selama terjadi restrukturisasi organisasi, termasuk pengangkatan CEO (*Chief Executive Officer*). Jika pada kondisi ini, perusahaan harus melaporkan kerugian maka manajer mungkin merasa terdorong untuk melaporkan kerugian yang besar (walaupun perusahaan hanya mengalami kerugian yang sedikit). Caranya antara lain: perusahaan akan menghapus *asset*, menyediakan *expected future cost*, dan secara umum siap “mendandani” laporan keuangan. Tindakan ini dapat mendorong pelaporan laba di masa yang akan datang. Healy juga menyatakan bahwa manajer yang pendapatan bersihnya di bawah *bogey* (batas minimum penghasilan untuk mendapatkan bonus) dari *bonus*

plan, mungkin juga akan melakukan *taking a bath*, dengan alasan yang sama untuk mendorong bonus yang besar di masa yang akan datang.

b. *Income minimation*

Pola ini hampir sama dengan *taking a bath*, namun pola ini kurang ekstrim dibandingkan *taking a bath*. Pola ini mungkin dipilih oleh kebijakan politis perusahaan yang tampak (terjadi) selama pendapatan yang tinggi. Cara-cara yang dilakukan dalam pola ini seperti: penghapusan aktiva modal dan aktiva tidak berwujud secara cepat, pembebanan biaya iklan, biaya penelitian dan pengembangan, dan lain-lain.

c. *Income maximation*

Healy (1985) menyatakan manajer mungkin menggunakan pola *income maximation* untuk melaporkan pendapatan (laba) dengan motivasi bonus, dengan tidak meletakkan pendapatan mereka di atas *cap* (batas maksimum pendapatan yang masih mendapatkan bonus). Perusahaan-perusahaan yang ditutup atas kejahatan hutang, mungkin juga melakukan pola *income maximation*.

d. *Income smoothing*

Pola ini merupakan pola yang paling menarik dari keseluruhan teknik-teknik manajemen laba di atas. Healy menyatakan bahwa manajer-manajer mempunyai insentif untuk meratakan laba secara tepat yang menyebabkan pendapatan berada di antara *bogey* dan *cap*. Jika tidak, pendapatan yang tidak stabil atau rata akan merugikan pembagian bonus secara sementara maupun permanen. Selanjutnya

jika manajer adalah penolak resiko, mereka akan menyiapkan sedikit aliran bonus, dan selanjutnya mungkin ingin meratakan laba. Beberapa kemungkinan lain dalam perataan laba antara lain: manajer mungkin meratakan laba untuk mengurangi kemungkinan dipecat, dan tujuan pelaporan eksternal dengan maksud menyampaikan isi informasi ke pasar dengan kemampuan perusahaan untuk mengkomunikasikan harapan akan kekuatan yang stabil atas laba.

Menurut Ayres ada tiga faktor yang bisa dikaitkan dengan munculnya praktik-praktik manajemen laba (Gumanti, 2003: 24-25), yaitu:

a. Manajemen akrual (*accruals management*)

Manajemen akrual biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer (*manager's discretion*). Contoh manajemen akrual antara lain adalah dengan mempercepat pengakuan atau menunda pengakuan akan pendapatan, menganggap sebagai ongkos (beban biaya) atau menganggap sebagai suatu tambahan investasi atas suatu biaya.

b. Penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib (*adoption of changes to mandatory accounting policy*)

Terkait dengan penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib dilakukan oleh perusahaan, manajemen perusahaan memiliki dua pilihan, yaitu apakah perusahaan menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut. Biasanya, untuk

suatu kebijaksanaan akuntansi baru yang wajib (*mandatory accounting policy*), badan akuntansi yang ada memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk dapat menerapkannya lebih awal dari waktu berlakunya. Para manajer tentu saja akan memilih untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang baru bila dengan penerapan tersebut akan dapat mempengaruhi baik aliran kas maupun keuntungan perusahaan.

c. Perubahan akuntansi secara sukarela (*voluntary accounting changes*)

Perubahan metode akuntansi secara sukarela biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan yang ada (GAAP). Misalnya, melalui perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO ke LIFO atau sebaliknya, perubahan metode penyusutan aktiva dari metode garis lurus (*straight line*) ke metode penyusutan dipercepat (*accelerated*) atau sebaliknya, dan atau pengakuan atas biaya produksi, yaitu antara menggunakan metode biaya penuh (*absorption* atau *full costing*) atau biaya langsung variabel (*variable* atau *direct costing*).

McNichols dan Wilson menambahkan faktor keempat yang telah diuraikan menurut Ayres di atas, yang biasa menjadi sarana manajemen untuk mempengaruhi prestasi keuangannya (Gumanti, 2003: 25) yaitu melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan operasi, investasi, dan pembelanjaan (*operating, investing, and financing policies*).

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

b. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

2.1.5. Perbedaan Manajemen Laba (*Earnings Management*) dengan *Financial Fraud*

Nampak jelas bahwa banyak cara yang bisa dilakukan oleh manajer atau pembuat laporan keuangan untuk mempengaruhi penampilan prestasi keuangan atau keuntungan. Hal yang perlu diingat adalah walaupun pasar dalam batas-batas tertentu menyadari adanya manajemen laba, praktik manajemen laba dapat memiliki dampak yang jelek. Manajemen laba yang berlebihan dapat mengarah kepada kejahatan keuangan (*financial fraud*) seperti yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di Amerika beberapa tahun lalu. Manajemen laba dalam arti sempit berbeda dengan kejahatan keuangan.

National Association of Certified Fraud Examiners mengartikan *financial fraud* (Dechow dan Skinner, 2000: 238) sebagai:

“The intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or her judgement or decisions”.

Dari definisi tersebut nampak jelas bahwa *financial fraud* bisa diartikan sebagai bentuk manajemen laba yang ekstrim. Secara implisit atau mungkin eksplisit dapat dinyatakan bahwa manajemen laba yang dapat “menggangu” atau membahayakan baik itu manajemen maupun perusahaan dapat dikatakan *fraud*.

Dechow dan Skinner (2000: 239) menggambarkan perbedaan manajemen laba dalam bentuk table 2.1. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada sejumlah cara yang dapat dilakukan oleh manajemen dalam rangka pengaturan angka-angka

akuntansi yang dilaporkan mulai dari yang memiliki efek kecil sampai besar. Tingkat pelanggaran yang mungkin muncul dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu dari konservatif, netral, agresif, sampai dengan bentuk pelanggaran berat, yaitu *fraud*. Pihak manajemen perusahaan tentunya memiliki dasar yang kuat pada saat mana mereka akan menggunakan model akuntansi konservatif dan pada saat mana mereka akan menggunakan yang berkategori *fraud*. Pilihan-pilihan akuntansi atau kebijakan-kebijakan akuntansi tertentu ada yang langsung mengarah kepada kejahatan keuangan (*fraud*) dan ada juga, walaupun dikategorikan agresif tetapi masih “dapat diterima” berdasarkan kontesks GAAP. Jadi perlu kehati-hatian dalam membedakan *financial fraud* dan manajemen laba.

Tabel 2.1
Perbedaan antara *Fraud* dan *Earnings Management*

	Accounting Choices Whitin GAAP	“Real” Cash Flow Choices
“Conservative” Accounting	<ul style="list-style-type: none"> - Overly aggressive recognition of provisions or reserves - Overvaluing of acquired in process R&D in purchase acquisitions - Overstatement of restructuring charges and asset write-offs 	<ul style="list-style-type: none"> - Delaying sales - Accelerating R&D or advertising expenditures
“Neutral” Earnings	<ul style="list-style-type: none"> - Earnings that result from a neutral operation of the process 	
“Aggressive” Accounting	<ul style="list-style-type: none"> - Understatement of the provisions for bad debt - Drawing down provisions or reserves In overly aggressive manner 	<ul style="list-style-type: none"> - Postponing R&D or advertising expenditures - Accelerating sales
“Fraudulent” Accounting	<ul style="list-style-type: none"> - Violates GAAP - Recording sales before they are “realizable” - Recording fictitious sales - Backing sales invoices - Overstating inventory by recording fictitious inventory 	

Sumber : Dechow dan Skinner (2000: 239)

2.1.6. Pengertian Akruai

Dalam akuntansi dikenal istilah basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas (*cash basis*). Istilah akrual ini digunakan untuk menentukan penghasilan (*revenue*) pada saat diperoleh dan untuk mengakui beban yang sepadan dengan *revenue* pada periode yang sama, tanpa memperhatikan waktu penerimaan kas dari penghasilan yang bersangkutan. Sedang istilah basis kas adalah pengakuan beban dan *revenue* atas dasar kas tunai yang diterima. Pengakuan atas dasar kas ini menyimpang dari konsep dasar akuntansi yaitu *matching of cost with revenue* (memadankan antara penghasilan dan beban) sehingga konsep pengakuan *revenue* dan beban atas dasar kas tunai yang diterima tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Pengertian akrual dapat diartikan lawan dari kas sebagai dasar pengakuan pendapatan dan beban. Konsep akrual digunakan untuk memenuhi konsep dasar akuntansi *matching of cost with revenue* (memadankan antara penghasilan dan beban). Menurut konsep dasar *matching of cost with revenue*, pengakuan beban atau pendapatan harus diakui sesuai dengan hak yang diukur dalam satu periode akuntansi tidak mempertimbangkan adanya penerimaan kas tunai, karena konsep dasar kas tidak dapat memenuhi kriteria kesepadanan antara penghasilan dan beban atau *matching of cost with revenue*. Oleh karena itu pengakuan pendapatan dan beban menurut standar akuntansi yang diterima oleh umum menggunakan konsep akrual. Dalam prosesnya konsep akrual ini memungkinkan adanya perilaku manajer untuk

melakukan rekayasa laba atau *earning management* guna menaikkan atau menurunkan porsi angka akrual dalam laporan laba rugi.

Perekayasaan menaikkan atau menurunkan akrual antara lain dapat dilakukan dengan cara mempercepat pendapatan atau mempercepat beban. Perekayasaan laba tersebut termasuk salah satu praktek manajemen laba (*earning management*) melalui rekayasa akrual. Yang menarik, laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan dan menyusun kontrak oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai konsekuensi ekonomi. Sebagai contoh, laba sering digunakan sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak, serta laba juga digunakan sebagai kriteria penilaian kinerja perusahaan.

Ada dua konsep akrual, yaitu: *discretionary accrual* dan *non-discretionary accrual*. *Discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen, contoh : Pada akhir tahun buku perusahaan mengetahui bahwa suatu piutang tertentu tidak dapat ditagih. Perusahaan dapat melakukan pencatatan kapan piutang tersebut dihapuskan, pada periode buku sekarang atau pada tahun buku berikutnya. Sedang *non-discretionary accrual* adalah sebaliknya, pengakuan akrual laba yang wajar yang tunduk terhadap suatu standar atau prinsip akuntansi yang berterima umum, contoh : Satu fakta yang sama dapat dilaporkan dengan cara yang berbeda, mesin yang sama dapat didepresiasi dengan dua metode yang berbeda (metode depresiasi garis lurus dan metode atau saldo menurun) atau dengan dua estimasi umur ekonomis yang berbeda.

Perbedaan metode atau perbedaan estimasi tersebut akan menghasilkan nilai akhir atau laba yang sedikit berbeda. Oleh karena *non discretionary accrual* merupakan akrual yang wajar, dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan tidak wajar maka *non discretionary accrual* ini tidak relevan dengan objek penelitian ini. Oleh karena itu bentuk akrual yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bentuk *discretionary accrual* yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi.

2.1.7. Pajak Tangguhan

a. Pengertian Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian. Pajak tangguhan dapat dibedakan menjadi Aktiva Pajak Tangguhan (*deferred tax assets*) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (*deferred tax liabilities*).

Menurut PSAK No.46, aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Di sisi lain, terdapat kewajiban pajak tangguhan yang merupakan jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Perbedaan temporer muncul karena adanya perbedaan jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan Dasar Pengenaan Pajak (selanjutnya disingkat DPP) atas aktiva atau kewajiban tersebut. Perbedaan temporer tersebut dapat berupa :

1. Perbedaan Temporer Kena Pajak (*taxable temporary differences*) yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal tahun mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Contoh: penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) mungkin berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba akuntansi
2. Perbedaan Temporer yang Boleh Dikurangkan (*deductible temporary differences*) yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal tahun mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban dilunasi. Contoh: biaya manfaat pensiun dapat dikurangkan dalam menentukan laba akuntansi sebagai jasa yang diberikan oleh pegawai, tetapi biaya tersebut baru dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak pada saat iuran atau manfaat pensiun tersebut dibayar oleh entitas.

Koreksi-koreksi fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap laporan keuangan komersial perusahaan dan saldo rugi fiskal yang dikompensasikan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor

36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh) juga dapat menimbulkan perbedaan temporer yang pada akhirnya menimbulkan pajak tangguhan.

Perbedaan temporer timbul karena (1) adanya perbedaan waktu (*time difference*) yang timbul karena pos-pos pendapatan dan beban diakui dalam tahun yang berbeda dalam rangka pelaporan keuangan komersial dan pelaporan pajak; (2) perbedaan lain yang mungkin timbul karena pengurangan DPP untuk aktiva yang disusutkan akibat adanya Ketentuan Khusus UU PPh. Perbedaan waktu dapat menyebabkan :

1. Laba komersial sebelum pajak lebih besar dari laba kena pajak (dikoreksi negatif)

Terdapat dua penyebab timbulnya laba komersial sebelum pajak yang lebih besar dari laba kena pajak, yaitu:

- Adanya pendapatan atau keuntungan tertentu yang telah diakui dalam laporan keuangan tahun berjalan, tetapi pengenaan pajaknya baru dilakukan pada tahun berikutnya.
- Adanya beban atau kerugian tertentu yang dikurangkan untuk perhitungan pajak tahun berjalan, tetapi baru akan dikurangkan dalam tahun mendatang untuk tujuan pelaporan keuangan. Contoh: beban penyusutan yang timbul akibat perbedaan masa manfaat aktiva menurut Undang-Undang PPh, dimana masa manfaat aktiva menurut UU PPh lebih pendek dibandingkan estimasi masa manfaat aktiva yang dilakukan oleh manajemen, sehingga beban penyusutan menurut pajak lebih besar pada tahun berjalan dibandingkan perhitungan dalam laporan keuangan komersil.

2. Laba komersial sebelum pajak lebih kecil dari laba kena pajak (dikoreksi positif)

Terdapat dua penyebab munculnya laba komersial sebelum pajak yang lebih kecil dari laba kena pajak, yaitu:

- Adanya pendapatan atau keuntungan yang dikenakan pajak pada tahun berjalan, tetapi ditangguhkan dan diakui pada tahun mendatang untuk tujuan pelaporan keuangan. Contoh: pendapatan sewa yang diterima dimuka diakui sebagai pendapatan dalam perpajakan pada saat uang sewa tersebut diterima, tetapi pengakuan pendapatannya dapat ditangguhkan dan diakui pada tahun mendatang untuk tujuan pelaporan keuangan.
- Adanya beban atau kerugian tertentu yang dikurangkan untuk perpajakan pada tahun mendatang, tetapi dikurangkan pada tahun berjalan untuk tujuan pelaporan keuangan. Contoh: beban garansi hanya akan dikurangkan untuk perpajakan jika benar-benar terjadi, tetapi biaya tersebut diperhitungkan dimuka untuk tujuan pelaporan keuangan.

b. Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*)

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan timbul akibat adanya perbedaan temporer. Perbedaan temporer timbul apabila penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi yang berbeda dengan tahun saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan laba fiscal.

Pengakuan aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan melibatkan tiga hal, antara lain:

1. Perbedaan Temporer Kena Pajak (*Taxable Temporary Differences*)

Perbedaan temporer kena pajak mengakibatkan bertambahnya jumlah penghasilan kena pajak di masa depan. Seluruh perbedaan temporer kena pajak akan diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (*Deferred Tax Liabilities = DTL*)

2. Perbedaan Temporer yang Boleh Dikurangkan (*Deductible Temporary Differences*)

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan mengakibatkan berkurangnya jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) sepanjang perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat digunakan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Penggunaan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan pada masa mendatang terjadi dalam bentuk pengurangan laba fiskal, tetapi manfaat ekonomi yang berupa pengurangan pembayaran pajak hanya akan dinikmati oleh perusahaan apabila perusahaan itu memiliki laba fiskal dalam jumlah yang memadai. Dengan demikian, perusahaan akan mengakui aktiva pajak tangguhan jika terdapat kemungkinan bahwa laba fiskal tersedia dalam jumlah yang memadai, sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dapat dimanfaatkan.

3. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa datang memadai untuk dilakukannya kompensasi atas saldo rugi fiskal.

c. Pengukuran dan Penyajian Pajak Tangguhan dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No.46, pengukuran aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Kewajiban (aktiva) pajak kini untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.
2. Kewajiban (aktiva) pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat kewajiban dilunasi atau aktiva dipulihkan, yaitu dengan tarif pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.
3. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aktiva atau penyelesaian kewajiban yang diharapkan perusahaan pada tanggal neraca.
4. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh didiskonto (discounted)
5. Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal neraca).

Dalam hal ini, perusahaan harus menurunkan nilai tercatat tersebut apabila laba

fiskal tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila laba fiskal besar kemungkinan memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan.

IAS No.12 mengharuskan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan secara bersih pada neraca, jika aktiva dan kewajiban tersebut berasal dari unsur aktiva dan kewajiban pajak yang dapat saling mengurangi. Lebih lanjut, IAS No.12 menjelaskan bahwa aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi fiskal yang dapat dikompensasi dapat disajikan bersih dengan kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer pada akumulasi depresiasi aktiva tetap (Purba dan Andreas, 2005).

PSAK No.46 tidak mengatur penyajian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan seperti yang diatur oleh IAS No.12 tersebut di atas. PSAK No.46 revisi 2010 menyatakan bahwa entitas dapat melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, entitas: a) memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan b) berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Meskipun aset dan liabilitas pajak kini diakui dan diukur secara terpisah, aset dan liabilitas pajak kini tersebut saling hapus dalam laporan posisi keuangan bergantung pada kriteria serupa yang ditetapkan untuk instrumen keuangan dalam PSAK 50 (revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian. Entitas biasanya memiliki

hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini ketika berkaitan dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama dan memperbolehkan entitas melakukan atau menerima pembayaran neto tunggal.

2.1.8. Pengertian Laba (*Income*)

Income dalam konteks perpajakan dapat berbeda atau bahkan berbeda dengan makna *income* dalam akuntansi atau pelaporan keuangan. Dalam perpajakan, *income* dimaknai sebagai jumlah kotor sehingga dimaknai sebagai penghasilan sebagaimana digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan *income* dalam akuntansi lebih dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dari pemilik.

Pada konsep akrual laba diukur dengan memadankan antara penghasilan dan beban tidak didasarkan atas kas tunai yang diterima. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2007, penghasilan diakui dalam laporan laba rugi hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut mengalir kepada perusahaan. Prosedur yang biasanya dianut dalam praktik untuk mengakui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar akuntansi. Sedangkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah

terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya akrual hak karyawan, atau penyusunan aktiva tetap).

Dari konsep *matching of cost with revenue* dalam laporan laba rugi akan diperoleh laba atau rugi. Laba (*earning*) merupakan selisih antara pendapatan dan biaya yang menunjukkan sisa positif, sebaliknya rugi apabila menunjukkan sisa minus. Perusahaan dengan laba yang rendah biasanya dianggap kinerjanya kurang berhasil dibandingkan perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang tinggi. Selain itu, laba juga sering dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan oleh berbagai pihak antara lain investor, kreditor, manajemen dan pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini berkepentingan terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Dhaliwal et. al, 1994; Guenther 1994; Maydew 1997 dalam Hidayati dan Zulaikah, 2003). Dengan adanya konsep *matching of cost with revenue* ini, sering manajemen memanfaatkan konsep akrual untuk melakukan manajemen laba guna tujuan-tujuan tertentu, misalnya harapan manajemen untuk memperoleh bonus, mengurangi *volatility of earnings*, untuk meminimalkan beban pajak penghasilan, dan merekayasa laba untuk tujuan lainnya.

Untuk menganalisis ada atau tidaknya rekayasa laba, maka dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian memisahkan *non discretionary accrual* (tingkat laba akrual yang wajar) dan *discretionary accrual* (tingkat laba yang tidak normal) untuk setiap perusahaan dalam setiap tahun. Laba akrual merupakan laba

bersih operasi yang didasarkan pada perhitungan akrual, sedangkan *non discretionary accrual* merupakan laba akrual yang wajar yang tidak dipengaruhi oleh manajemen, dan *discretionary accrual* adalah tingkat laba abnormal yang merupakan pilihan pihak manajemen.

2.1.9. Perubahan Tarif PPh Badan Menurut UU Perpajakan di Indonesia

Perubahan UU Pajak terbaru di Indonesia terjadi tahun 2008 meliputi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Hal ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007, UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Pada tahun 2007 amandemen Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah efektif sejak 1 Januari 2008. Selain UU No. 28/2007 tersebut DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bersama DPR telah berhasil menyelesaikan UU No. 36/2008 pada tanggal 23 September 2008, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 ada 5 (lima) hal yang

diatur dalam penurunan tarif. Pertama, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh potongan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh. Kedua, Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Ketiga, masing-masing pihak sebagaimana dimaksud diatas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor. Keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Terakhir, waktu enam bulan sebagaimana dimaksud diatas adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

Salah satu perubahan yang mencolok pada ketentuan pajak penghasilan adalah perubahan tarif yang membedakan antara Wajib Pajak (WP) Badan dan wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak. Pada table 2.2. disajikan adanya perubahan tarif dan lapisan penghasilan kena pajak badan sejak diundangkannya UU PPh tahun 1984 sampai dengan tahun 2008. Ada empat kali perubahan tarif yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku tahun 1984, tarif UU

PPh tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang mulai berlaku pada tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009.

Jika perusahaan memandang moment perubahan UU tersebut sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, maka perusahaan dapat memanfaatkan peluang untuk menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun 2007 dan 2008, sehingga akan menunda pengakuan laba tahun 2007 dan 2008. Dengan penundaan pengakuan laba atau percepatan biaya ke tahun 2007 dan 2008 akan menjadikan laba tahun 2007 dan 2008 lebih rendah. Laba yang ditunda pengakuannya akan dilaporkan pada laporan keuangan tahun 2009, dan 2010 maka akan dihemat pajak sebesar tarif dikalikan selisih lapisan penghasilan kena pajak.

Tabel 2.2.
Perbedaan tarif UU PPh 1983, 1994, 2000, dan 2008 untuk Wajib Pajak Badan

UU No. 7 / 1983 PKP dan Tarif	UU No. 10 /1994 PKP dan Tarif	UU No. 17 /2000 PKP dan Tarif	UU No. 36 / 2008 PKP dan Tarif
PKP s/d 10.000.000 = 15 %	PKP s/d 25.000.000 = 10 %	PKP s/d 50.000.000 =10 %	Tarif W P Badan & bentuk usaha tetap adalah 28% tahun 2009 dan 25% tahun 2010 seterusnya, dan bisa turun sebesar 5% untuk WP berbentuk perseroan terbuka yg paling sedikit 40 % dari jumlah keseluruhan saham yg disetor, diperdagangkan di BEI dan atau lebih dari keseluruhan saham disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak.
PKP diatas 10.000.000 s/d 50.000.000 = 25 %	PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000 = 15 %	PKP diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 = 15 %	
PKP diatas 50.000.000 = 35 %	PKP diatas 50.000.000 = 30 %	PKP diatas 100.000.000 = 30 %	

Sumber : UU Perpajakan (www.google.com)

2.2. Penelitian Sebelumnya

Salah satu insentif yang dapat mendorong manajer untuk melakukan rekayasa laba adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak atau meminimalkan total nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Scott, 2003; Hidayati dan Zulaikah, 2003; Setiawati dan Na'im, 2000). Di Amerika Serikat terdapat studi empiris tentang perilaku yang memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan (yang dikenal dengan TRA/ *Tax Reform Act*). Studi empiris ini mengevaluasi perilaku manajemen laba dalam kaitannya dengan minimalisasi pajak (Guenther, 1994). *Tax Reform Act* (TRA) di Amerika Serikat dipublikasikan pada bulan September 1986, dan berlaku efektif 1 Juli 1987 sehingga fleksibilitas kebijakan akuntansi berperan sebagai suatu peluang yang tersedia untuk menunda pelaporan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) mencoba mengevaluasi pengaruh publikasi TRA terhadap perusahaan di United State (US). Seperti banyak penelitian manajemen yang lain, Guenther memfokuskan pada total akrual. Dalam penelitiannya Guenther tidak berhasil membuktikan bahwa satu periode sebelum berlakunya TRA 1986, perusahaan melakukan penurunan akrual untuk memaksimalkan penghematan pajak. Kegagalan Guenther untuk membuktikan bahwa penurunan pajak dapat mempengaruhi kebijakan akrual perusahaan ini mungkin disebabkan tidak diperhitungkannya keterbatasan manajer untuk melakukan rekayasa akrual.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Siti Munfiah (2003) dalam mendeteksi adanya *earning management* menggunakan pendekatan *discretionary*

accrual model Jones. Hasil penelitiannya tidak dapat membuktikan adanya perilaku perusahaan yang berusaha untuk menurunkan laba pada tahun 2000 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak tahun yang bersangkutan..

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2004) yang menguji adanya indikasi manajemen laba saat sebelum dan sesudah perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan tahun 2000. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa faktor perubahan tarif pajak penghasilan badan berdampak pada perilaku manajemen laba perusahaan. Hal ini ditandai dengan nilai hasil pengujian manajemen laba yang membuktikan bahwa nilai *discretionary accrual* setelah perubahan tarif PPh Badan lebih tinggi daripada nilai *discretionary accrual* sebelum perubahan tarif PPh Badan. Hal ini berarti bahwa pihak manajemen perusahaan cenderung untuk menunda penghasilannya pada tahun 2000, dimana tarif PPh Badannya masih tinggi, dan kemudian mengakuinnya sebagai penghasilan pada tahun 2001, dimana tarif PPh Badannya lebih kecil, sehingga perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak.

Yin dan Cheng (2004) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merespon perubahan tarif pajak. Mereka menguji pengaruh dari insentif pajak dan insentif non pajak terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merespon perubahan tarif pajak di Amerika Serikat. Yin dan Cheng (2004) menggunakan pendekatan *discretionary current accrual* dalam mendeteksi manajemen laba, tetapi penelitian ini menggunakan seluruh *discretionary accrual*

(termasuk *non current*). Hal ini dikarenakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan tidak cukup hanya dideteksi melalui *discretionary current accrual*, mengingat adanya *accrual* yang berasal dari *non-current accrual* yang harus diperhitungkan, contohnya: penyusutan aktiva tetap.

Subagyo dan Oktavia (2010) melakukan penelitian praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan pada periode tahun 2008 dan 2009 atas respon perubahan undang-undang tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa apakah perusahaan-perusahaan yang memperoleh keuntungan atau kerugian akan membuat manajemen laba dalam menanggapi perubahan tarif pajak perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga akan memeriksa apakah laba manajemen didasarkan pada insentif pajak atau non-insentif pajak. Sampel penelitian dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: perusahaan laba dan perusahaan rugi. Studi ini mencakup 160 sampel perusahaan laba dan 89 sampel perusahaan rugi di sektor manufaktur antara periode 2008 - 2009. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: (1) Perusahaan yang membuat manajemen laba dalam rangka merespon perubahan pajak perusahaan hanya perusahaan laba; (2) manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *profit* dipengaruhi oleh insentif pajak dan non-insentif pajak; (4) manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan rugi hanya dipengaruhi oleh non-insentif pajak, dan (5) manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sampel (perusahaan laba dan perusahaan rugi) tidak dipengaruhi oleh persentase dari total saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI.

Mengacu pada penelitian terdahulu, penelitian ini akan menguji penurunan lapisan Penghasilan Kena Pajak dan perubahan tarif pada Wajib Pajak di Indonesia tahun 2008, yang diberlakukan efektif tahun 2009, memberikan peluang kepada perusahaan untuk menikmati penghematan pajak, sehingga menyebabkan manajer untuk melakukan rekayasa akrual laba atau beban.

2.3. Kerangka Pemikiran

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia menerbitkan kembali undang-undang yang merevisi Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tahun 2009. Penelitian ini hanya menyoroti mengenai perubahan tarif pajak PPh Badan di Indonesia saja, karena sejak diterbitkannya UU ini terjadi perubahan tarif PPh Badan yang cukup signifikan. Dengan diberlakukannya tarif pajak yang baru ini, perusahaan khususnya yang telah *go public* akan sangat diuntungkan. Jika pihak manajemen perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk menurunkan laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak tersebut. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, perubahan tarif pajak Badan di Indonesia akan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu: 28% pada tahun 2009, dan 25% pada tahun 2010. Sehingga kemungkinan besar perusahaan akan melakukan manajemen laba pada tahun sebelum diberlakukannya tarif pajak tersebut, yaitu tahun 2007, 2008 dan tahun 2009. Alasan penulis memasukan tahun 2007 dalam penelitian ini karena sudah

ada wacana perubahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perpajakan yang diajukan pemerintah mulai tahun 2005, dimana pemerintah berencana menerapkan tarif tunggal untuk menggantikan tarif progresif Pasal 17 Pajak Penghasilan. Besaran tarif yang diusulkan adalah 28% dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diturunkan menjadi 25%. Tarif tunggal diterapkan untuk wajib pajak badan dan berlaku sama untuk seluruh wajib pajak badan. Manajemen Laba dalam penelitian ini diwakili dengan *discretionary accrual* dan pajak tangguhan (*deferred tax*).

Penelitian yang dilakukan oleh Yin dan Cheng (2004) menggunakan proksi perencanaan pajak sebagai ukuran dari insentif pajak. Meskipun banyak penelitian di luar negeri yang meneliti mengenai perilaku manajemen laba dikaitkan dengan perubahan tarif pajak (Scholes et al, 1992; Guenther, 1994; Maydew, 1997), tetapi hanya penelitian Yin dan Cheng (2004) saja yang memasukkan unsur insentif pajak dalam penelitiannya. Yin dan Cheng (2004) berpendapat bahwa upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan dibatasi oleh perencanaan pajaknya.

Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan juga dipengaruhi oleh insentif atau faktor non pajak. Guenther (1994) menemukan bukti empiris bahwa insentif non pajak (ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial) berpengaruh signifikan terhadap *discretionary current accrual*. Menurut Yin dan Cheng (2004), perbedaan dalam insentif non pajak di antara perusahaan yang memperoleh laba dengan perusahaan yang mengalami kerugian menentukan bahwa manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif pajak, berbeda di antara kedua jenis perusahaan tersebut.

Insentif non pajak dalam penelitian Yin dan Cheng (2004) diukur dengan *earnings pressure*, tingkat utang, *earnings bath*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Holland dan Ramsay (2003) menemukan, ada metodologi lain yang dapat digunakan dalam penelitian manajemen laba yaitu dengan mengidentifikasi kondisi yang menimbulkan insentif manajemen laba. Faktor-faktor tersebut antara lain, ukuran perusahaan, kualitas auditor, pertumbuhan penjualan, arus kas operasi, penerapan *corporate governance*, dan penggunaan utang.

Di Indonesia penelitian serupa dilakukan oleh Yulianti (2004); Subagyo dan Oktavia (2010). Faktor pemicu manajemen laba yang digunakan dalam penelitiannya adalah, profitabilitas, utang, besarnya perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan penerapan *corporate governance* di perusahaan. Sedangkan Subagyo dan Oktavia (2010) menggunakan pendekatan yang sama dengan Yin dan Cheng (2004).

Pada penelitian ini untuk variabel insentif pajak digunakan proksi perencanaan pajak yaitu tarif pajak dikali laba komersil sebelum pajak dikurangi beban pajak kini seperti yang dilakukan oleh Yin dan Cheng (2004); Subagyo dan Oktavia (2010). Penelitian ini tidak memasukan beberapa ukuran dari insentif non pajak yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010) antara lain:

- a. Ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan *Earnings bath* karena pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010), variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap *earnings management*.

b. Persentase saham disetor yang diperdagangkan di BEI, karena pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010), variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap *earnings management*. Selain itu terdapat penurunan batas porsi saham publik untuk mendapatkan insentif pajak, dari 40% menjadi 35%, menurut pengamat pasar modal Edwin Sinaga dalam Harian Seputar Indonesia tanggal 3 Oktober 2011 bahwa pengurangan batasan untuk mendapatkan insentif pajak, belum bisa dipastikan pengaruhnya.

Berdasarkan uraian di atas maka insentif non pajak yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Earnings pressure*

Insentif pajak mengimplikasikan bahwa perusahaan akan memilih untuk menurunkan laba sebagai respon atas penurunan tarif pajak. Untuk perusahaan yang labanya tidak mencapai target, penurunan laba yang dilakukan untuk tujuan pajak dapat dikurangi oleh *earnings pressure* guna meningkatkan laba akuntansi.

b. *Tingkat utang*

Dalam konteks penurunan tarif pajak, keputusan untuk melakukan manajemen laba sangat erat kaitannya dengan tingkat utang perusahaan. Ukuran ini tetap dimasukkan walaupun dalam penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) tidak berpengaruh signifikan karena perusahaan akan melakukan manajemen laba secara agresif untuk mencegah pelanggaran terhadap kontrak hutang (Watts dan Zimmerman, 1986).

c. Kualitas *auditor*

Variabel ini merupakan variabel yang berbeda dari Subagyo dan Oktavia (2010). Variabel ini dimasukkan karena ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan akan berhubungan dengan keandalan dan kualitas hasil auditnya. Auditor merupakan pihak independen yang dapat mengurangi fleksibilitas manajemen melakukan manajemen laba. Semakin besar ukuran KAP akan semakin baik kualitas audit perusahaan. Auditor yang termasuk didalam lima besar (*Big Five*) diyakini memiliki pengalaman dan kualitas audit yang lebih baik di banding auditor di luar lima besar. Hasil penemuan oleh Francis, et al. (1999) berkesimpulan, perusahaan yang diaudit oleh KAP yang termasuk *big six* melaporkan tingkat akrual diskresioner yang rendah. Lennox juga berkesimpulan bahwa laporan audit yang diterbitkan oleh KAP besar memiliki keakuratan yang lebih tinggi dan lebih informatif dibanding dengan laporan audit yang dikeluarkan oleh KAP kecil. Hal tersebut menunjukkan kualitas auditor dapat menentukan besarnya *earning management* yang dilakukan perusahaan.

d. Pertumbuhan (*Growth*)

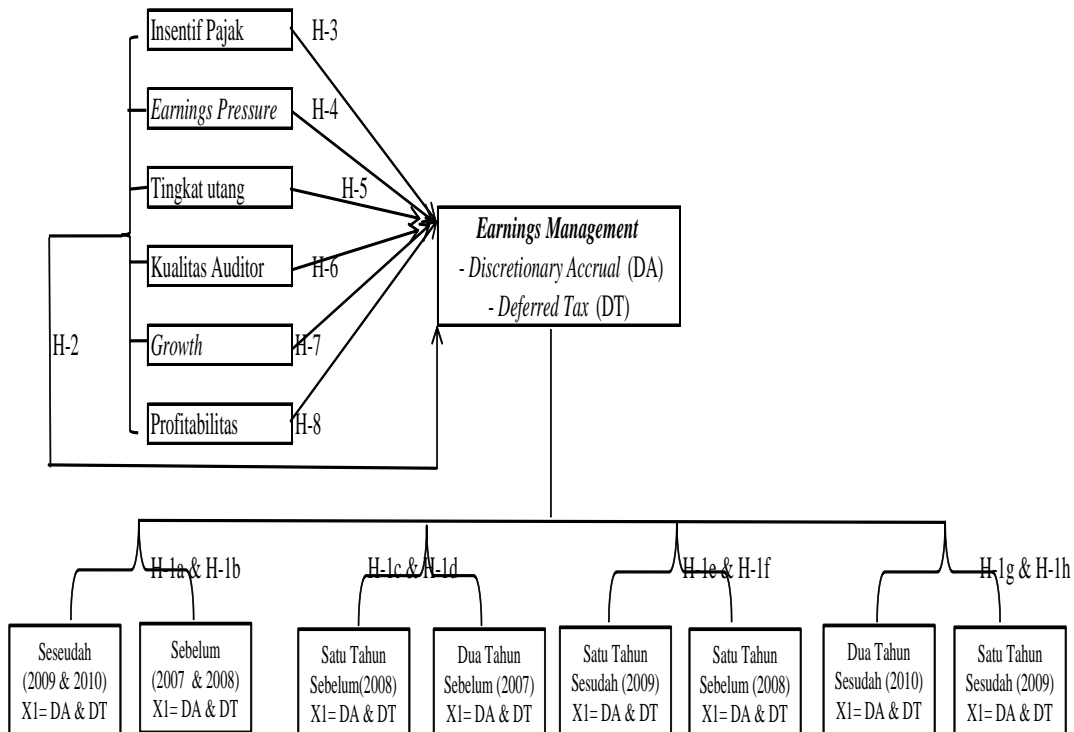
Variabel ini merupakan variabel yang berbeda dari Subagyo dan Oktavia (2010). Variabel ini dimasukkan karena menurut McNichols (2000) menyatakan bahwa besarnya akrual diskresioner terkait dengan pertumbuhan perusahaan, karena variabel pertumbuhan harus dimasukkan ke dalam model yang menggunakan akrual diskresioner. Ukuran pertumbuhan disini adalah pertumbuhan penjualan

perusahaan antar periode. Pertumbuhan penjualan mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk mengelola laba. Perusahaan dengan pertumbuhan tinggi akan merasa tidak perlu mempengaruhi laba agar menjadi positif atau meningkatkan labanya melalui manajemen laba.

e. Profitabilitas (ROA)

Variabel ini sebenarnya variabel yang berbeda dari Subagyo dan Oktavia (2010). Variabel ini dimasukan karena berdasarkan Hipotesa *bonus plan*; insentif manajer pada umumnya didasarkan pada profitabilitas perusahaan. Karenanya profitabilitas dapat dijadikan indikasi dilakukannya manajemen laba dalam perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan pengukur ROA (*Return on Asset*).

Hubungan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



2.4. Perumusan Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas maka hipotesis umum pertama sampai kedelapan (H-1 sampai H-8) dapat dinyatakan sebagai berikut:

- H-1a → H₀: *Discretionary accrual* selama dua tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan tidak lebih tinggi daripada selama dua tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
Ha: *Discretionary accrual* selama dua tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi daripada selama dua tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
- H-1b → H₀: *Deferred Tax* selama dua tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan tidak lebih tinggi dari pada selama dua tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
Ha: *Deferred Tax* selama dua tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi dari pada selama dua tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
- H-1c → H₀: *Discretionary accrual* satu tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan tidak lebih rendah dari pada dua tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
Ha: *Discretionary accrual* satu tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan lebih rendah dari pada dua tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
- H-1d → H₀: *Deferred tax* satu tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan tidak lebih rendah dari pada dua tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
Ha: *Deferred tax* satu tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan lebih rendah dari pada dua tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
- H-1e → H₀: *Discretionary accrual* satu tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan tidak lebih tinggi dari pada satu tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
Ha: *Discretionary accrual* satu tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi dari pada satu tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.

- H-1f → H0: *Deferred tax* satu tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan tidak lebih tinggi dari pada satu tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
Ha: *Deferred tax* satu tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi dari pada satu tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
- H-1g → H0: *Discretionary accrual* dua tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan tidak lebih tinggi dari pada satu tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan.
Ha: *Discretionary accrual* dua tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi dari pada satu tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan.
- H-1h → H0: *Deferred tax* dua tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan tidak lebih tinggi dari pada satu tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan.
Ha: *Deferred tax* dua tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi dari pada satu tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan.
- H-2a → H0: Insentif pajak dan non insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
Ha: Insentif pajak dan non insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
- H-2b → H0: Insentif pajak dan non insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
Ha: Insentif pajak dan non insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
- H-3a → H0: Insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
Ha: Insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
- H-3b → H0: Insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
Ha: Insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
- H-4a → H0: *Earnings pressure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
Ha: *Earnings pressure* berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*

- H-4b → H0: *Earnings pressure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
Ha: *Earnings pressure* berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
- H-5a → H0: Tingkat utang tidak berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
Ha: Tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
- H-5b → H0: Tingkat utang tidak berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
Ha: Tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
- H-6a → H0: Kualitas Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
Ha: Kualitas Auditor berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
- H-6b → H0: Kualitas Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
Ha: Kualitas Auditor berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
- H-7a → H0: *Growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
Ha: *Growth* berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
- H-7b → H0: *Growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
Ha: *Growth* berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
- H-8a → H0: Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
Ha: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*
- H-8b → H0: Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
Ha: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini dilakukan penentuan metode penelitian yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Pembahasan pada bab ini akan diawali dengan pembahasan desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel, model penelitian dan teknik analisis.

3.1. Desain Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang diklasifikasikan sebagai penelitian deduktif (Indiantoro dan Bambang, 2002: 23), yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu. Dari teori yang ada diturunkan hipotesis yang selanjutnya diuji dengan kenyataan di lapangan. Teori yang diuji dalam penelitian ini adalah mengenai *earnings management* dan variabel-variabel penentunya.

3.1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis (*hypotheses testing*) tentang praktik *earnings management* sebelum dan sesudah perubahan UU No. 36 tahun 2008

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hipotesis dikembangkan berdasarkan teori-teori yang selanjutnya diuji berdasarkan data yang dikumpulkan.

3.1.3. Unit Analisis

Menurut Sularso (2003: 51), unit analisis adalah tingkat agregasi data untuk keperluan analisis. Dalam penelitian unit analisis hanya dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan yang *go public* di seluruh Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Karena alasan keterbatasan data, perusahaan-perusahaan (tidak *go public*) tidak disertakan dalam penelitian ini.

3.1.4. Horizon Waktu

Identifikasi praktik manajemen laba sebelum dan sesudah perubahan UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 akan dideteksi melalui laporan keuangan. Pada penelitian ini data dibatasi hanya pada laporan keuangan pada tahun 2006-2010, dua tahun sebelum perubahan UU PPh dan dua tahun setelah perubahan UU PPh.

3.1.5. Lingkungan Studi

Penelitian ini melibatkan lingkungan penelitian yang natural (bukan buatan), yaitu *field study* untuk mendeteksi praktik manajemen laba dari data keuangan pada perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel tertentu.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2010. Penelitian ini mengambil periode analisis dari tahun 2006 sampai 2010. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Metode ini menggunakan kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan tidak dikelompokkan kedalam jenis industri jasa keuangan. Hal ini karena jenis industri ini memiliki perbedaan karakteristik akrual dibandingkan jenis industri lainnya
- b. Menerbitkan data laporan keuangan tahunan yang lengkap selama periode pengamatan 2006-2010.
- c. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian selama periode pengamatan tahun 2006 – 2010.
- d. Perusahaan harus memperoleh laba selama periode pengamatan 2006-2010.
- e. Dengan kriteria tersebut maka jumlah sampel yang terpilih adalah 51 perusahaan dengan 204 laporan keuangan tahunan. Berikut hasil pemilihan sampel akhir:

Tabel 3.1.
Pemilihan Sampel Penelitian

Jumlah Populasi Per 31 Desember 2010	420
Jenis industri jasa keuangan	(69)
<i>Listing</i> setelah tahun 2007	(42)
Laporan keuangan tidak lengkap dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010	(188)
Perusahaan mengalami kerugian pada periode 2006-2010	(70)
Jumlah sampel yang digunakan	51

Sumber: www.idx.co.id, *Indonesian Capital Market Directory* 2008 dan 2010

Berikut nama-nama perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini :

Tabel 3.2.
Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk
2	AIMS	Akbar Indomakmur Stimec Tbk
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk
4	ASGR	Astra Graphia Tbk
5	ASII	Astra International Tbk
6	AUTO	Astra Otoparts Tbk
7	Bata	Sepatu Bata Tbk
8	BTEL	Bakrie Telecom Tbk
9	BUDI	Budi Acid Jaya Tbk
10	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk
11	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk
12	EKAD	Ekadharma International Tbk
13	EPMT	Enseval Putra Megatrading Tbk
14	FAST	Fast Food Indonesia Tbk
15	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
16	GGRM	Gudang Garam Tbk
17	HERO	Hero Supermarket Tbk
18	HMSP	HM Sampoerna Tbk
19	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk
20	INAF	Indofarma Tbk
21	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
22	INTA	Intraco Penta Tbk
23	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
24	ISAT	Indosat Tbk
25	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk
26	KBLM	Kabelindo Murni Tbk
27	KOIN	Kokoh Inti Arebama Tbk
28	LION	Lion Metal Works Tbk
29	LMSH	Lionmesh Prima Tbk
30	LTLS	Lautan Luas Tbk
31	MDRN	Modern Internasional Tbk

No	Kode	Nama Perusahaan
32	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
33	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk
34	MTDL	Metrodata Electronics Tbk
35	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk
36	SDPC	Millennium Pharmacon International Tbk
37	SIPD	Sierad Produce Tbk
38	SMAR	SMART Tbk
39	SMGR	Semen Gresik (Persero) Tbk
40	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
41	SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk
42	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
43	TCID	Mandom Indonesia Tbk
44	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk
45	TIRA	Tira Austenite Tbk
46	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
47	TURI	Tunas Ridean Tbk
48	UNTR	United Tractors Tbk
49	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
50	VOKS	Voksel Electric Tbk
51	WEHA	Panorama Transportasi Tbk

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Daftar perusahaan yang *go public* diperoleh dari <http://www.idx.co.id> dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Selain itu, untuk memperoleh data pendukung lainnya yang di-download dari <http://google.co.id> dan sumber-sumber lain yang diperlukan. Penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mencari dan mempelajari literatur-literatur serta jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian yang dibahas.

3.4. Identifikasi dan pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Earnings Management* (manajemen laba) yang diukur dengan *discretionary accruals* dan *deferred tax expense*. Variabel independen adalah insentif pajak, *earnings pressure*, tingkat utang, kualitas auditor, *growth* dan profitabilitas. Identifikasi dan pengukuran dari masing-masing variabel dijelaskan berikut ini:

1. Variabel Dependen

Manajemen laba diukur dengan *discretionary accruals* dan *deferred tax expense*. *Discretionary accruals* (DA), perhitungan *discretionary accruals* menggunakan model Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow et al. (1995) yaitu sebagai berikut:

a. Menghitung total akrual

$$TACC_{it} = NI_{it} - CF_{it}$$

Yang terdiri dari:

$TACC_{it}$ = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NI_{it} = Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada tahun t

CF_{it} = Kas dari operasi (*cash flow operation*) perusahaan i pada tahun t

b. Menghitung tingkat akrual yang normal

Tingkat akrual yang normal dapat dihitung dengan memisahkan *discretionary accrual* dengan *non discretionary accrual*, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$TACC_{it}/TA_{it-1} = \alpha_1(1/TA_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it}/TA_{it-1})$$

Yang terdiri dari:

$TACC_{it}$ = Total akrual perusahaan i pada tahun t

TA_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

ΔREC_{it} = Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

$\alpha_1, \beta_1, \beta_2$ = Estimasi *non-discretionary accrual*

ε_{it} = *error term* perusahaan i pada tahun t

Jadi, total akrual merupakan penjumlahan antara *non-discretionary accrual*

dengan *discretionary accrual* yang dinyatakan pada persamaan berikut ini:

$$TACC_{it} = NDA_{it} + DA_{it}$$

Yang terdiri dari:

$TACC_{it}$ = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} = *Nondiscretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

DA_{it} = *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

c. Menghitung tingkat akrual yang tidak normal

$$DA_{it} = TACC_{it}/TA_{it-1} - [\alpha_1(1/TA_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it}/TA_{it-1})]$$

Sedangkan *Deferred tax* (DT) diukur dengan:

$$DT_{it} = \frac{DT_{it}}{TA_{it-1}}$$

Dimana,

DT_{it} = *Deferred tax benefit (expense)* perusahaan i pada tahun t

TA_{it-1} = Total Asset pada akhir tahun t-1

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Perencanaan pajak (TAXPLAN)

Insentif pajak diproksikan dengan perencanaan pajak. Berdasarkan penelitian Yin dan Cheng (2004), perencanaan pajak pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$TAXPLAN = \frac{\sum_{2007}^{2008} (30\% * PTI - CTE) : 2}{TA_{2008}}$$

Yang terdiri dari:

TAXPLAN = Perencanaan pajak

PTI = *Pre-tax income*

CTE = *Current portion of total tax expense* (beban pajak kini).

Pada penelitian ini, digunakan tarif dengan persentase 30% karena sebelum diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, lapisan penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif ini adalah yang paling terbesar

proporsinya. Selain itu, alasan digunakannya tarif efektif 30% ini karena perusahaan *go public* rata-rata memiliki laba di atas Rp100.000.000,-.

b. *Earnings pressure* (EPRESS)

Earnings pressure (EPRESS) dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu: (laba tahun berjalan – laba tahun lalu) / Total asset awal tahun.

c. Tingkat utang (DEBT)

Diukur dengan menggunakan rasio kewajiban jangka panjang terhadap total aset awal tahun.

d. Kualitas auditor (AUD)

Auditor perusahaan *i* pada tahun *t*. Bernilai 1 jika *Big Four* dan 0 jika lainnya.

e. *Sale Growth* (GROWTH)

Variabel *growth* diukur dengan

$$SaleGrowth = \frac{Sale_t - Sale_{t-1}}{Sale_{t-1}}$$

f. Profitabilitas (ROA)

Variabel ROA diukur dengan

$$ROA_{it} = \frac{NetIncome_{it}}{TotalAsset_{it}}$$

3.5. Model Penelitian

Hipotesis H1 akan diuji dengan menggunakan Uji beda t-test. Sedangkan untuk menjawab Hipotesis H2 sampai dengan H8 akan digunakan regresi berganda dengan model sebagai berikut:

Model 1

$$DA_{it} = a + b_1 YD2009 * TAXPLAN_{it} + b_2 YD2010 * TAXPLAN_{it} + c_1 EXPRESS_{it} + c_2 DEBT_{it} + c_3 AUD_{it} + c_4 GROWTH_{it} + c_5 ROA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Model 2

$$DT_{it} = a + b_1 YD2009 * TAXPLAN_{it} + b_2 YD2010 * TAXPLAN_{it} + c_1 EXPRESS_{it} + c_2 DEBT_{it} + c_3 AUD_{it} + c_4 GROWTH_{it} + c_5 ROA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

DA = Discretionary accruals

DT = Deferred Tax

TAXPLAN = Perencanaan pajak

YD2009 = 1 untuk tahun 2009, dan 0 untuk tahun lainnya

YD2010 = 1 untuk tahun 2010, dan 0 untuk tahun lainnya

EXPRESS = Earnings pressure

DEBT = Tingkat utang

AUD = Kualitas Auditor

GROWTH = Pertumbuhan

ROA = Profitabilitas

3.6. Teknik Analisis

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer melalui penggunaan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Analisis data diawali dengan pengujian normalitas data, kemudian diikuti dengan pengujian asumsi model regresi linier berganda dan yang terakhir dilakukan pengujian hipotesis.

3.6.1. Pengujian Normalitas Data

Pengujian dilakukan untuk mengetahui alat analisis apa yang seharusnya digunakan (parametrik atau non parametrik). Pengujian distribusi data akan dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov Test, dengan dasar pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan probabilitas yaitu: jika $Asymp. Sig > \text{taraf signifikan } 0,05$ maka distribusi normal dan jika $Asymp. Sig. < \text{taraf signifikan } 0,05$ maka distribusi tidak normal. Menurut Ghozali (2001:74) untuk Uji normalitas model regresi, metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

3.6.2. Pengujian Asumsi Model Regresi Linier Berganda

Untuk menghasilkan estimator yang baik sehingga tidak terjadi kesalahan dalam regresi linier berganda. Maka sebelum dilakukan pengujian model regresi berganda harus memenuhi asumsi klasik yaitu:

1. Tidak terjadi multikolinieritas (*multicollinearity*)

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas di antara satu lainnya atau variabel bebas tidak bersifat ortogonal (Arief, 1993: 23). Suatu model regresi linier berganda terdapat multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* (TOL) $\leq 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 (Ghozali, 2001: 57).

2. Tidak terjadi autokorelasi (*autocorrelation*)

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*time series data*) atau ruang (*cross sectional data*) (Gujarati, 1997: 201). Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi dalam penelitian ini digunakan uji *Durbin-Watson* (DW) dengan ketentuan: DW kurang dari 1,10 ada autokorelasi, DW 1,10-1,54 tanpa kesimpulan, DW 1,55-2,46 tidak autokorelasi, DW 2,47-2,90 tanpa kesimpulan, dan DW lebih dari 2,91 ada autokorelasi (Algifari dalam Joni, 2006: 64).

3. Tidak terjadi heteroskedastisitas (*heteroscedastisity*)

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Menurut Ghozali (2001:69) salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat grafik plot antara variabel terikat ($ZPRED$) dengan residualnya ($SRESID$). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara $SRESID$ dan

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar analisisnya adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3. Model Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Pertama

Untuk menguji hipotesis pertama (H_1), maka akan dilakukan pengujian dengan menggunakan perbandingan *discretionary accruals* dan *deferred tax* sebelum dan sesudah perubahan UU 36 tahun 2008. Pengujian tahap pertama menggunakan uji parametrik *Paired Sample T-Test* yang digunakan untuk membandingkan *mean* dari suatu sampel yang berpasangan (*paired*) jika data berdistribusi normal. Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda.

Keputusan:

Jika Asymp. Sig.>0,05 pada taraf keyakinan 95 % atau Sig.>0,10 pada taraf keyakinan 90 % maka H_0 tidak dapat ditolak (diterima) dan

jika Asymp. Sig. < 0,05 pada taraf keyakinan 95 % atau Sig.<0,10 pada taraf keyakinan 90 % maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

Dan uji nonparametrik Mann Whitney jika data tidak berdistribusi normal.

2. Pengujian Kedua

Hipotesis yang akan diuji dalam tahap kedua ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel independen (insentif pajak dan non pajak) terhadap variabel dependen (*discretionary accruals* dan *deferred tax*), secara parsial maupun simultan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Dari ini diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

b. Uji Secara Parsial

Uji terhadap koefisien regresi secara parsial menggunakan uji-t pada tingkat keyakinan 95%, 90 % dan tingkat kesalahan analisa (α) 5%, 10 %. Uji parsial ini digunakan untuk menguji hipotesis ketiga (H-3a dan H-3b), hipotesis keempat (H-4a dan H-4b), hipotesis kelima (H-5a dan H-5b), hipotesis keenam (H-6a dan H-6b),hipotesis ketujuh (H-7a dan H-7b) dan hipotesis kedelapan (H-8a dan H-8b).

Keputusan:

Jika $\text{Sig.} > 0,05$ pada taraf keyakinan 95 % atau $\text{Sig.} > 0,10$ pada taraf keyakinan 90 % : H_0 tidak dapat ditolak (diterima)

Jika $\text{Sig.} < 0,05$ pada taraf keyakinan 95 % atau $\text{Sig.} < 0,10$ pada taraf keyakinan 90 % : H_0 ditolak dan H_a diterima.

c. Uji Secara Simultan

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji-F pada tingkat keyakinan 95%, 90 % dan tingkat kesalahan analisis (α) 5%, 10%. Uji Simultan ini digunakan untuk menguji Hipotesis kedua (H-2a dan H-2b)

Keputusan:

Jika $\text{Sig.} > 0,05$ atau Jika $\text{Sig.} > 0,10$: H_0 tidak dapat ditolak (diterima)

Jika $\text{Sig.} < 0,05$ atau Jika $\text{Sig.} < 0,10$: H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dilakukan analisis data dengan menggunakan program SPSS. Analisis data dilakukan setelah penulis memperoleh seluruh data laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini dari www.idx.co.id. Data laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Setelah seluruh data disiapkan, maka langkah berikutnya data tersebut akan diolah dengan program SPSS. Output data yang dihasilkan program SPSS yang akan digunakan dalam analisis terdiri dari statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji hipotesis. Selanjutnya pembahasan pada bab ini diawali dengan melakukan analisis statistik deskriptif, pengujian kualitas data yang digunakan dan yang terakhir pengujian hipotesis.

4.1. Statistik Deskriptif

Dari statistik deskriptif terlihat bahwa Rata-rata *discretionary accrual* sebesar 0,00023491 dan *deferred tax* sebesar -0,00018462. Untuk Statistik deskriptif variabel lain dari 204 observasi pada perusahaan manufaktur dapat dilihat pada table 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1.
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA	204	-.271110	.654361	.00023491	.133919661
DT	204	-.034018	.017841	-.00018462	.006365621
YD2009TAXPLAN	204	-.010888	12.017506	.05894364	.841396943
YD2010TAXPLAN	204	-.010888	12.017506	.05894364	.841396943
EPRESS	204	-.260219	.520884	.02314009	.061360395
DEBT	204	.000000	.991578	.09351150	.137293228
AUDIT	204	0	1	.60	.490
GROWTH	204	-.476024	1.487150	.19532534	.285614515
ROA	204	.000808	.507910	.09057270	.088869737
Valid N (listwise)	204				

Sumber : Lampiran 5.a.

4.2. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data diperlukan untuk mengetahui alat analisis yang seharusnya digunakan yaitu apakah analisa statistik parametrik atau non parametrik. Dari hasil uji normalitas data terlihat (tabel 4.2.) bahwa data berdistribusi normal untuk *discretionary accrual* (DA) tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 karena Asymp. Sig (*Asymptotic significance 2-tailed*) lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk data *deferred tax* (DT) tahun 2008 sampai tahun 2010 berdistribusi normal namun data tahun 2007 tidak berdistribusi normal karena Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.2.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		DA2007	DA2008	DA2009	DA2010
N		51	51	51	51
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	-.0141551807	.0413800947	-.0286631425	.0023778613
	Std. Deviation
Most Extreme Differences	Absolute	.087	.131	.065	.129
	Positive	.082	.131	.065	.129
	Negative	-.087	-.084	-.060	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.621	.937	.461	.923
Asymp. Sig. (2-tailed)		.835	.343	.983	.362

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Lampiran 5.b.

Tabel 4.3.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		DT2007	DT2008	DT2009	DT2010
N		51	51	51	51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.00114722	.00201226	-.00074115	-.00086237
	Std. Deviation	.009157656	.005755860	.004708248	.004324723
Most Extreme Differences	Absolute	.202	.089	.079	.143
	Positive	.138	.089	.079	.069
	Negative	-.202	-.077	-.049	-.143
Kolmogorov-Smirnov Z		1.443	.634	.564	1.019
Asymp. Sig. (2-tailed)		.031	.816	.908	.250

a. Test distribution is Normal.

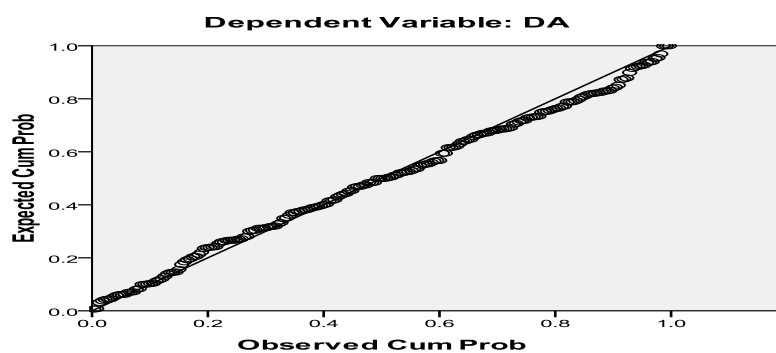
b. Calculated from data.

Sumber: Lampiran 5.b.

Selanjutnya untuk normalitas model regresi 1 dan model regresi 2 dapat dilihat dari grafik normal P-P dan test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Untuk Model 1 (*discretionary accrual/DA*) data berdistribusi normal karena titik tersebar di sekitar garis diagonal dan Asymp. Sig (2-tailed) atas *standardized residual* (RESDA) lebih besar dari 0,05. Sedangkan Untuk Model 2 (*deferred tax/DT*) data tersebar disekitar garis diagonal namun Asymp. Sig (2-tailed) atas *standardized residual* (RESDT) lebih kecil dari 0,05 sehingga data berdistribusi tidak normal.

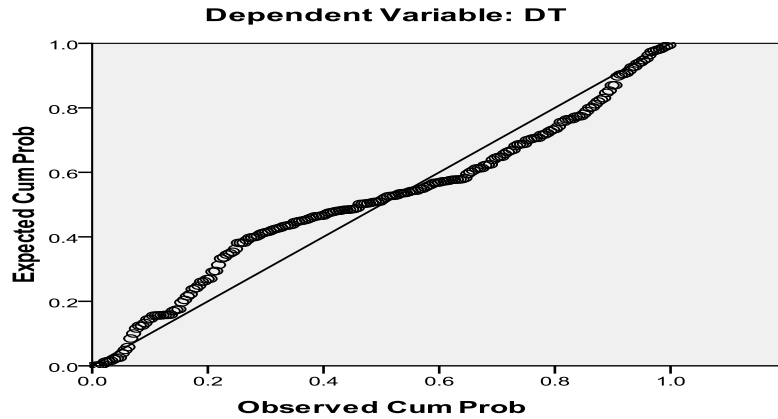
Gambar 4.1.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Lampiran 5.f.

Gambar 4.2.
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Lampiran 5.g.

Tabel 4.4.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		RESDA	RESDT
N		204	204
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.00000000	.00000000
	Std. Deviation	.125220404	.00593491
Most Extreme Differences	Absolute	.061	.129
	Positive	.061	.070
	Negative	-.040	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		.874	1.842
Asymp. Sig. (2-tailed)		.429	.002

a. Test distribution is Normal.

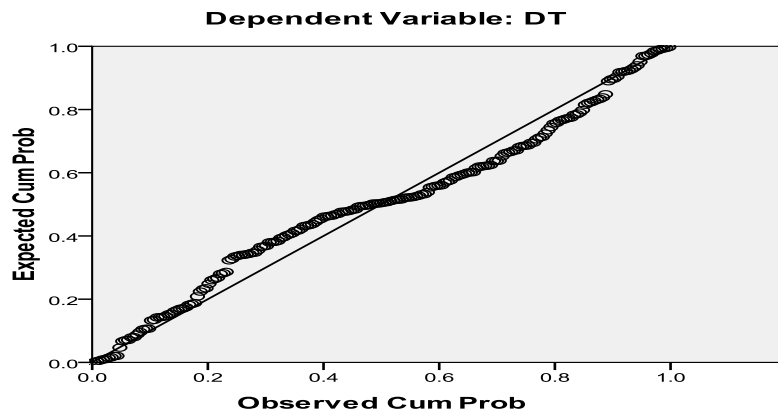
b. Calculated from data.

Sumber: Lampiran 5.b.

Untuk memperbaiki data model 2, maka dikeluarkan data-data yang berada jauh dari garis diagonal (*outliers*) sebanyak 3 buah. Hasil pengujian normalitas setelah mengeluarkan tiga *outliers* tersebut dapat dilihat pada gambar 4.3. dan tabel 4.5. Untuk Model 2, data telah berdistribusi normal karena titik tersebar di sekitar garis

diagonal dan Asymp. Sig (2-tailed) atas *standardized residual* (RESDT) lebih besar dari 0,05.

Gambar 4.3.
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Lampiran 5.h.

Tabel 4.5.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		RESDT2
N		201
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00520121
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.068
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		1.252
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Lampiran 5.b.

4.3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian model regresi berganda dalam menguji hipotesis haruslah menghindari penyimpangan terhadap asumsi klasik yaitu multikolinieritas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinieritas

Pada model 1 dan model 2, hasil pengujian terhadap gejala multikolinieritas dengan menggunakan TOL (tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor) (tabel 4.6.) menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas yang berbahaya dalam penelitian karena nilai *Tolerance* (TOL) > 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10.

Tabel 4.6. Model 1

		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	.013	.019		.655	.513			
	YD2009TAXPLAN	-.007	.011	-.042	-.618	.537	.987	1.014	
	YD2010TAXPLAN	-.008	.011	-.049	-.733	.464	.991	1.010	
	EPRESS	.831	.192	.381	4.339	.000	.579	1.726	
	DEBT	.006	.070	.006	.079	.937	.876	1.141	
	AUDIT	-.028	.020	-.102	-1.393	.165	.838	1.193	
	GROWTH	.001	.032	.003	.037	.970	.942	1.061	
	ROA	-.162	.145	-.108	-1.118	.265	.480	2.084	

a. Dependent Variable: DA

Sumber: Lampiran 5.f.

Table 4.7. Model 2

		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	.001	.001		1.716	.088			
	YD2009TAXPLAN	-7.242E-5	.000	-.011	-.163	.871	.986	1.014	
	YD2010TAXPLAN	.000	.000	.025	.357	.721	.991	1.010	
	EPRESS	.018	.008	.208	2.281	.024	.581	1.721	
	DEBT	-.010	.003	-.237	-3.192	.002	.874	1.145	
	AUDIT	.001	.001	.072	.955	.341	.839	1.191	
	GROWTH	7.374E-5	.001	.004	.054	.957	.960	1.041	
	ROA	-.013	.006	-.210	-2.085	.038	.475	2.105	

a. Dependent Variable: DT

Sumber: Lampiran 5.h.

2. Uji Autokolerasi

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokolerasi, maka penulis menggunakan menggunakan Durbin Watson (DW). Hasil regresi menunjukkan DW sebesar 1,739 untuk model regresi 1 (tabel 4.8.a) dan 2,044 untuk model regresi 2 (tabel 4.8.b) yang menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala autokolerasi karena DW berada di dalam interval 1,55 sampai 2,46.

Tabel 4.8.a

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.355 ^a	.126	.094	.127436867	1.739

a. Predictors: (Constant), ROA, YD2009TAXPLAN, YD2010TAXPLAN, GROWTH, DEBT, AUDIT, EPRESS

b. Dependent Variable: DA

Sumber: Lampiran 5.f.

Tabel 4.8.b.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.261 ^a	.068	.035	.005294696	2.044

a. Predictors: (Constant), ROA, YD2009TAXPLAN, YD2010TAXPLAN, GROWTH, DEBT, AUDIT, EPRESS

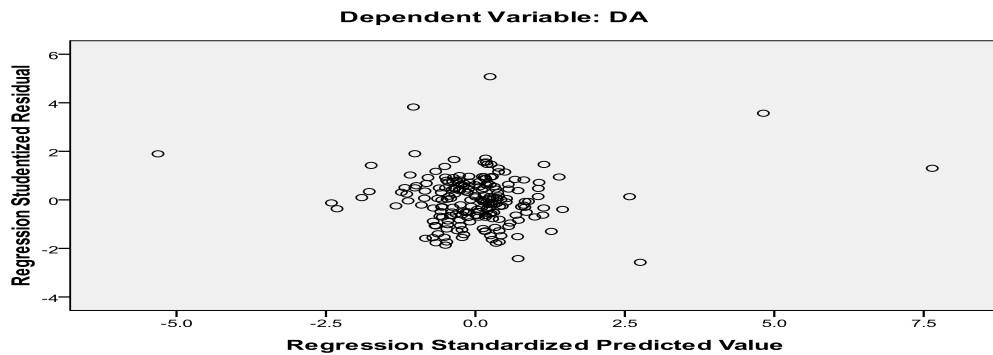
b. Dependent Variable: DT

Sumber: Lampiran 5.h.

3. Uji Heteroskedastisitas

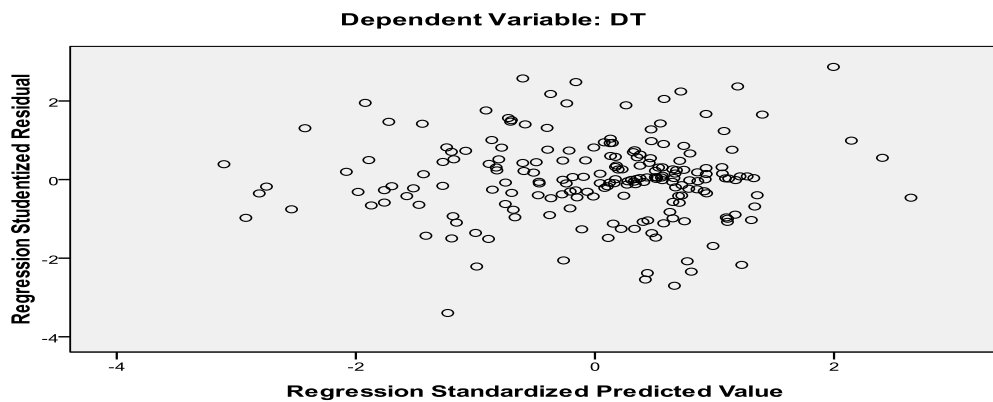
Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.4. dan 4.5. menunjukkan bahwa grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang akan digunakan.

Gambar 4.4. Model 1
Scatterplot



Sumber: Lampiran 5.f.

Gambar 4.5. Model 2
Scatterplot



Sumber: Lampiran 5.h.

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1. Pengujian Pertama

1. Perhitungan *Discretionary Accrual*

Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai total akrual. Nilai total akrual dijadikan sebagai variabel dependen dimana cara perhitungan total akrual

telah dijelaskan pada bab III. Kemudian dilakukan regresi untuk menentukan nilai estimasi *non-discretionary accrual*. Model persamaan regresi berganda yang digunakan untuk mengestimasi *non-discretionary accrual* sebagai berikut :

$$TACC_{it}/TA_{it-1} = \alpha_1(1/TA_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it}/TA_{it-1})$$

Untuk regresi ini telah lolos uji asumsi klasik yang terdapat pada lampiran 5.e.5.

Hasil regresi menyajikan data sebagai berikut:

Tabel 4.9. Akruai 2007

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.014	.034		-.411	.683		
	TA	5874.215	3921.176	.179	1.498	.141	.977	1.024
	REV	.171	.045	.445	3.769	.000	.998	1.002
	PPE	-.153	.061	-.301	-2.529	.015	.978	1.023

a. Dependent Variable: TACC

Sumber : Lampiran 5.e.1

Tabel 4.10. Akruai 2008

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.041	.060		.689	.494		
	TA	9150.384	5680.152	.227	1.611	.114	.902	1.109
	REV	-.013	.070	-.027	-.191	.850	.925	1.081
	PPE	-.203	.102	-.280	-1.980	.054	.898	1.114

a. Dependent Variable: TACC

Sumber : Lampiran 5.e.2

Tabel 4.11. Akrual 2009

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.029	.030		-.950	.347		
	TA	2885.482	5240.486	.080	.551	.585	.945	1.058
	REV	-.012	.043	-.041	-.278	.782	.915	1.093
	PPE	-.102	.067	-.220	-1.519	.135	.952	1.051

a. Dependent Variable: TACC

Sumber : Lampiran 5.e.3.

Tabel 4.12. Akrual 2010

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.093	.035		2.697	.010		
	TA	-3419.693	7135.863	-.063	-.479	.634	.984	1.017
	REV	-.100	.054	-.245	-1.866	.068	.985	1.015
	PPE	-.191	.072	-.348	-2.636	.011	.981	1.019

a. Dependent Variable: TACC

Sumber : Lampiran 5.e.4.

Dimana :

$$TACC = TACC_{it} / TA_{it-1}$$

$$TA = 1 / TA_{it-1}$$

$$,REV = (\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / TA_{it-1}$$

$$PPE = PPE_{it} / TA_{it-1}$$

Dari hasil regresi yang diperoleh koefisiennya dipakai untuk menentukan besarnya nilai *non-discretionary accruals* yang akan digunakan untuk mencari *discretionary accruals*. Model persamaan *accruals* sebagai berikut:

Akrual 2007

$$TACC_{it}/TA_{it-1} = 5.874,215(1/TA_{it-1}) + 0,171((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) - 0,153(PPE_{it}/TA_{it-1})$$

Akrual 2008

$$TACC_{it}/TA_{it-1} = 9.150,384(1/TA_{it-1}) - 0,013((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) - 0,203(PPE_{it}/TA_{it-1})$$

Akrual 2009

$$TACC_{it}/TA_{it-1} = 2.885,482(1/TA_{it-1}) - 0,012((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) - 0,102(PPE_{it}/TA_{it-1})$$

Akrual 2010

$$TACC_{it}/TA_{it-1} = -3.419,693(1/TA_{it-1}) - 0,1((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) - 0,191(PPE_{it}/TA_{it-1})$$

Dari hasil perhitungan persamaan diatas diperoleh nilai *non-discretionary accrual*. Kemudian total akrual dikurangi dengan *non-discretionary accrual* untuk memperoleh nilai *discretionary accrual*. Nilai *discretionary accrual* pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yang disajikan dalam Lampiran 2.a. sampai dengan 2.d.

2. Uji Beda

Setelah melakukan pengujian regresi untuk menentukan nilai estimasi *non-discretionary accruals*, maka akan diperoleh nilai *discretionary accruals* yang akan dipergunakan sebagai ukuran manajemen laba. Uji beda T-test dilakukan atas *discretionary accruals* dan *deferred tax*. Selanjutnya dilakukan juga uji non parametrik-Mann Whitney untuk *deferred tax*. Perusahaan tidak melakukan manajemen laba jika nilai total akrual akan sama dengan nilai *non-discretionary accruals* atau *discretionary accruals* sama dengan nol. Berdasarkan hasil uji dengan

Independent Sampel t-test pada *discretionary accruals* yang dilakukan secara pertahun (tabel 4.13), maka dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Rata-rata *discretionary accruals* pada periode selama dua tahun setelah adanya UU perubahan tarif adalah negatif senilai -0,0131426406 yang relatif lebih rendah dari rata-rata *discretionary accruals* pada periode selama dua tahun sebelum adanya UU perubahan tarif pajak badan yang mempunyai nilai sebesar 0,0136124570 dengan nilai signifikansi sebesar 0,128 pada taraf signifikansi 0,05. Hal tersebut menyebabkan H₀ diterima dan H_a ditolak dari hipotesis pertama a (H-1a)
- b. Rata-rata *discretionary accruals* pada periode satu tahun sebelum adanya UU perubahan tarif adalah senilai 0,0413800947 yang relatif lebih tinggi dari rata-rata *discretionary accruals* pada periode dua tahun sebelum adanya UU perubahan tarif pajak badan yang mempunyai nilai sebesar -0,0141551807 dengan nilai signifikansi sebesar 0,059 pada taraf signifikansi 0,05. Hal tersebut menyebabkan H₀ diterima dan H_a ditolak dari hipotesis pertama c (H-1c)
- c. Rata-rata *discretionary accruals* pada periode satu tahun setelah adanya UU perubahan tarif adalah senilai -0,0286631425 yang relatif lebih rendah dari rata-rata *discretionary accruals* pada periode satu tahun sebelum adanya UU perubahan tarif pajak badan yang mempunyai nilai sebesar 0,0413800947 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 pada taraf signifikansi 0,05. Hal tersebut menyebabkan H₀ diterima dan H_a ditolak dari hipotesis pertama e (H-1e)

d. Rata-rata *discretionary accruals* pada periode dua tahun setelah adanya UU perubahan tarif adalah senilai 0,0023778613 yang relatif lebih tinggi dari rata-rata *discretionary accruals* pada periode satu tahun setelah adanya UU perubahan tarif pajak badan yang mempunyai nilai sebesar -0,0286631425 dengan nilai signifikansi sebesar 0,171 pada taraf signifikansi 0,05. Hal tersebut menyebabkan H0 diterima dan Ha ditolak dari hipotesis pertama g (H-1g)

Tabel 4.13.a
Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	DASBUU	.0136124570	102
	DASTUU	-.0131426406	102

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	DASBUU - DASTUU	-7.8491076E-3	6.1359302E-2	1.534	101	.128

Sumber : Lampiran 5.c.

Tabel 4.13.b
Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	DA2007	-.0141551807	51
	DA2008	.0413800947	51
Pair 2	DA2008	.0413800947	51
	DA2009	-.0286631425	51
Pair 3	DA2009	-.0286631425	51
	DA2010	.0023778613	51

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	DA2007 - DA2008	-5.553E-2	2.0528457E-1	2.8745589E-2	-1.1327249E-1	2.2019411E-3	-1.932	50	.059
Pair 2	DA2008 - DA2009	7.004E-2	1.7376941E-1	2.4332585E-2	2.1169800E-2	1.1891667E-1	2.879	50	.006
Pair 3	DA2009 - DA2010	-3.104E-2	1.5949488E-1	2.2333751E-2	-7.5899663E-2	1.3817656E-2	-1.390	50	.171

Sumber : Lampiran 5.c.

Untuk *deferred tax* dilakukan pengujian dengan pengujian ini dilakukan dengan uji parametrik dan nonparametrik. Hal ini disebabkan karena DT2007 tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji dengan Independent Sampel t-test pada *deferred tax* yang dilakukan secara pertahun (tabel 4.14), maka dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Rata-rata *deferred tax* pada periode selama dua tahun setelah adanya UU perubahan tarif adalah negatif senilai $-0,00080176$, nilai ini relatif lebih rendah dari rata-rata *deferred tax* pada periode selama dua tahun sebelum adanya UU perubahan tarif pajak badan yang mempunyai nilai sebesar $0,00043252$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,128$ pada taraf signifikansi $0,05$. Hal tersebut menyebabkan Hipotesis H-1b tidak dapat diterima. Uji non parametrik-Mann Whitney menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,027$ pada taraf signifikansi $0,05$. Hal tersebut menyebabkan H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis pertama b (H-1b).
- b. Rata-rata *deferred tax* pada periode satu tahun sebelum adanya UU perubahan tarif adalah senilai $0,00201226$, nilai ini relatif lebih tinggi dari rata-rata *deferred tax* pada periode dua tahun sebelum adanya UU perubahan tarif pajak badan yang mempunyai nilai sebesar $-0,0114722$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,045$ pada taraf signifikansi $0,05$. Hal tersebut menyebabkan Hipotesis H-1d tidak dapat diterima. Uji non parametrik-Mann Whitney menghasilkan nilai signifikansi

sebesar 0,093 pada taraf signifikansi 0,05 Hal tersebut menyebabkan H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis pertama d (H-1d).

- c. Rata-rata *deferred tax* pada periode satu tahun setelah adanya UU perubahan tarif adalah senilai -0,00074115, nilai ini relatif lebih rendah dari rata-rata *deferred tax* pada periode satu tahun sebelum adanya UU perubahan tarif pajak badan yang mempunyai nilai sebesar 0,00201226 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 pada taraf signifikansi 0,05. Hal tersebut menyebabkan Hipotesis H-1f tidak dapat diterima. Uji non parametrik-Mann Whitney menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,028 pada taraf signifikansi 0,05 Hal tersebut menyebabkan H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis pertama f (H-1f).
- d. Rata-rata *deferred tax* pada periode dua tahun setelah adanya UU perubahan tarif adalah senilai -0,0086237, nilai ini relatif lebih rendah dari rata-rata *deferred tax* pada periode satu tahun setelah adanya UU perubahan tarif pajak badan yang mempunyai nilai sebesar -0,00074115 dengan nilai signifikansi sebesar 0,849 pada taraf signifikansi 0,05. Hal tersebut menyebabkan Hipotesis H-1h tidak dapat diterima. Uji non parametrik-Mann Whitney nilai signifikansi sebesar 0,757 pada taraf signifikansi 0,05 Hal tersebut menyebabkan H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis pertama h (H-1h).

Tabel 4.14.a.

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	DTSBUU	.00043252	102	.007774150	.000769756
	DTSTUU	-.00080176	102	.004498533	.000445421

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	DTSBUU - DTSTUU	.001234282	.008218390	.000813742	-.000379963	.002848527	1.517	101	.132

Test Statistics^b

	DTSTUU - DTSBUU
Z	-2.215 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.027

a. Based on positive ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Sumber: Lampiran 5.c. dan 5.d.

Tabel 4.14.b.

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	DT2007	-.00114722	51	.009157656	.001282328
	DT2008	.00201226	51	.005755860	.000805982
Pair 2	DT2008	.00201226	51	.005755860	.000805982
	DT2009	-.00074115	51	.004708248	.000659287
Pair 3	DT2009	-.00074115	51	.004708248	.000659287
	DT2010	-.00086237	51	.004324723	.000605582

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	DT2007 - DT2008	-.003159478	.010984209	.001538097	-.006248837	-.000070120	-2.054	50	.045
Pair 2	DT2008 - DT2009	.002753412	.007629214	.001068304	-.000607661	.004899163	2.577	50	.013
Pair 3	DT2009 - DT2010	.000121217	.004522448	.000633269	-.001150742	.001393176	.191	50	.849

Test Statistics^c

	DT2008 - DT2007	DT2009 - DT2008	DT2010 - DT2009
Z	-1.678 ^a	-2.193 ^b	-.309 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.093	.028	.757

a. Based on negative ranks.

b. Based on positive ranks.

c. Wilcoxon Signed Ranks Test

Sumber: Lampiran 5.c. dan 5.d.

Berdasarkan uraian diatas, pengujian Hipotesis ke H-1a sampai H-1h maka H0 diterima dan Ha ditolak bahwa Perusahaan tidak melakukan manajemen laba sebagai respon perubahan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Setelah banyak kasus rekayasa laporan keuangan yang terjadi di Indonesia, Bapepam semakin meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan publik. Hal tersebutlah yang kemungkinan menyebabkan manajemen perusahaan publik lebih berhati-hati dalam melakukan rekayasa akrual untuk mempengaruhi laba perusahaan. Karena rekayasa yang mencolok akan mudah dideteksi dan mendapatkan pemeriksaan dari Bapepam sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terancam.

Penelitian ini konsisten dengan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) yang mengevaluasi pengaruh publikasi *Tax Reform Act* (TRA) terhadap perusahaan di Amerika. Hipotesis yang diajukan olehnya adalah akan terjadi penurunan laba yang ditandai dengan negatif accruals oleh perusahaan-perusahaan satu periode sebelum berlakunya TRA 1986, dimana perusahaan melakukan penurunan akrual untuk memaksimalkan penghematan pajak. Hasil

penelitian Guenther tidak berhasil menemukan adanya negatif accruals pada tahun sebelum perubahan undang-undang pajak yang baru.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2000) yang menyatakan tidak ada rekayasa laba akrual tahun 1994 dan 1995 dengan diundangkannya perubahan UU Perpajakan 1994 per 9 November 1994 dan juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Munfiah (2003) yang dalam pengujiannya menguji apakah dengan dikeluarkannya UU perpajakan tahun 2000 manajer akan berusaha menunda pengakuan laba satu periode sebelum berlakunya penurunan tarif baru dengan tujuan untuk mengurangi besarnya jumlah pajak yang dibayar. Proksi yang digunakan adalah *discretionary accrual*. Hipotesis yang diajukan olehnya bahwa *discretionary accruals* pada periode pertama berlakunya penurunan tarif pajak badan yang baru lebih tinggi dibandingkan dengan *discretionary accruals* pada satu periode sebelum berlakunya perubahan tarif pajak. Hasil penelitiannya tidak bisa membuktikan bahwa perusahaan berusaha menurunkan labanya pada tahun 2000 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2004) yang berusaha menemukan bukti empiris adanya praktis manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjelang undang-undang perpajakan tahun 2000. Hipotesis yang diajukan olehnya adalah *discretionary accruals* setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi daripada sebelum perubahan undang-undang perpajakan. Wulandari dkk berhasil membuktikan bahwa penurunan tarif pajak badan

merupakan insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba akuntansi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *discretionary accruals* sebelum perubahan UU perpajakan lebih rendah dari sesudah perubahan UU perpajakan.

4.4.2. Pengujian Kedua

Berdasarkan uraian di atas, maka model regresi yang digunakan sudah terbebas dari pelanggaran terhadap asumsi klasik.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis secara parsial, penulis akan menganalisis *adjusted R Square* (R^2) dalam model penelitian. Berdasarkan tabel Tabel 4.15. *adjusted R Square* (R^2) pada model 1 *discretionary accrual* (DA) senilai 9,40 % berarti variabel independen hanya dapat menjelaskan variasi yang terdapat dalam variabel dependen sebesar 9,40 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan. Sedangkan *adjusted R Square* (R^2) pada model 2 *deferred tax* (DT) senilai 3,50 % berarti variabel independen hanya dapat menjelaskan variasi yang terdapat dalam variabel dependen sebesar 3,50 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ramanathan tahun 1992 “dimana secara umum dapat dikatakan bahwa estimasi regresi linier untuk data lintas sektoral (*cross section*) akan menghasilkan koefisien R^2 yang relatif rendah karena adanya variasi yang besar antar masing-masing pengamatan” (Insukindro, 1998:2). Pengujian faktor-faktor

insentif dan insentif non pajak yang mempengaruhi manajemen laba terhadap *discretionary accrual* (DA) dan *deferred tax* (DT) sebagai pengukur manajemen laba, menghasilkan *adjusted R Square* (R^2) yang relatif kecil walaupun penelitian ini menggunakan data *cross section* dan *time series*.

Adjusted R Square (R^2) yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan faktor-faktor tersebut dalam menjelaskan variasi yang terjadi dalam pengukur manajemen laba relatif kecil dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi seperti kondisi kinerja keuangan perusahaan. Pada model *deferred tax* (DT) adalah faktor-faktor pembentuk instrument *deferred tax* itu sendiri seperti penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, biaya manfaat pensiun, metode penilaian persediaan dan lain-lain.

Tabel 4.15.

	DA				DT			
	Prediksi	Koefisien	t-statistik	p-value	Prediksi	Koefisien	t-statistik	p-value
Constant	(?)	0,013	0,655	0,513	(?)	0,00139	1,716	0,088
YD09*TAXPLAN	(-)	-0,007	-0,618	0,537	(-)	-0,00007	-0,163	0,871
YD10*TAXPLAN	(-)	-0,008	-0,733	0,464	(+)	0,00016	0,357	0,721
EPRESS	(+)	0,831	4339	0,000	(+)	0,01817	2,281	0,024
DEBT	(+)	0,006	0,079	0,937	(-)	-0,01043	-3,192	0,002
AUDIT	(-)	-0,028	-1393	0,165	(+)	0,00080	0,955	0,341
GROWTH	(+)	0,001	0,037	0,970	(+)	0,00007	0,054	0,957
ROA	(-)	-0,162	-1118	0,265	(-)	-0,01269	-2,085	0,038
Adjusted R SQUARE	0,094				0,035			

Sumber: Lampiran 5.f. dan 5.h.

2. Uji Parsial

Hasil uji parsial berdasarkan SPSS adalah sebagai berikut:

a. Insentif Pajak (*Tax Planning*)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh untuk model 1 (*discretionary accrual*) tingkat signifikan $0,537 > 0,05$. Dengan demikian, secara parsial H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis ketiga a (H-3a) yang artinya YD09*TAXPLAN tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *discretionary accrual*. Untuk model 2 (*deferred tax*) nilai tingkat signifikan $0,871 > 0,05$. Dengan demikian, secara parsial H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis ketiga b (H-3b) yang artinya YD09*TAXPLAN tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *deferred tax*. Hasil yang tidak signifikan, kemungkinan disebabkan peningkatan pengawasan oleh Bapepam atas perusahaan publik. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan publik lebih berhati-hati dalam melakukan rekayasa akrual untuk mempengaruhi laba perusahaan. Karena rekayasa yang mencolok akan mudah dideteksi dan mendapatkan pemeriksaan dari Bapepam sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terancam.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh untuk model 1 (*discretionary accrual*) nilai tingkat signifikan $0,464 > 0,05$. Dengan demikian, secara parsial H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis ketiga a (H-3a) yang artinya YD10*TAXPLAN tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *discretionary accrual*. Untuk model 2 (*deferred tax*) tingkat signifikan $0,721 > 0,05$.

Dengan demikian, secara parsial H₀ diterima dan H_a ditolak dari hipotesis ketiga b (H-3b) yang artinya YD10*TAXPLAN tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *deferred tax*. Hasil yang tidak signifikan, kemungkinan disebabkan peningkatan pengawasan oleh Bapepam atas perusahaan publik. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan publik lebih berhati-hati dalam melakukan rekayasa akrual untuk mempengaruhi laba perusahaan. Karena rekayasa yang mencolok akan mudah dideteksi dan mendapatkan pemeriksaan dari Bapepam sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terancam. Temuan ini tidak konsisten dengan temuan Subagyo dan Oktavia (2010), dan Yin dan Chang (2004).

b. *Earnings pressure* (EPRESS)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh untuk model 1 (*discretionary accrual*) nilai tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, secara parsial H₀ ditolak dan H_a diterima dari hipotesis keempat a (H-4a) yang artinya EPRESS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *discretionary accrual* dan hubungannya positif. Untuk model 2 (*deferred tax*) nilai tingkat signifikan $0,024 < 0,05$. Dengan demikian, secara parsial H₀ ditolak dan H_a diterima dari hipotesis keempat b (H-4b) diterima yang artinya EPRESS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *deferred tax* dan hubungannya positif. Hasil yang signifikan memberikan bukti empiris yang mengindikasikan bahwa manajer perusahaan publik cenderung melakukan “*big bath*” (meninggikan beban restrukturisasi). Hasil ini konsisten dengan temuan Subagyo dan Oktavia (2010) dan Yin dan Cheng (2004).

c. Tingkat utang (DEBT)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh untuk model regresi 1 (*discretionary accrual*) nilai tingkat signifikan $0,937 > 0,05$. Dengan demikian, secara parsial H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis kelima a (H-5a) yang artinya DEBT tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *discretionary accrual* dan hubungannya positif. Hasil yang tidak signifikan mungkin disebabkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan aturan melalui konversi hutang menjadi saham, di mana suatu perusahaan menerbitkan saham baru kepada kreditur sebagai bentuk pembayaran atas kewajibannya, sehingga perusahaan tidak memiliki tekanan untuk mengolah akrualnya. Temuan ini konsisten dengan temuan Subagyo dan Oktavia (2010) dan tidak konsisten dengan temuan Yin dan Cheng (2004). Untuk model regresi 2 (*deferred tax*) nilai tingkat signifikan $0,002 < 0,05$. Dengan demikian, secara parsial H_0 ditolak dan H_a diterima dari hipotesis kelima b (H-5b) yang artinya DEBT mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *deferred tax* dan mempunyai hubungan negatif. Hasil ini memberikan bukti empiris bahwa manajer perusahaan dapat mengolah laba melalui *deferred tax* untuk mencegah pelanggaran terhadap kontrak hutang.

d. Kualitas Auditor (AUDIT)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh untuk model 1 (*discretionary accrual*) nilai tingkat signifikan $0,165 > 0,05$. Dengan demikian,

secara parsial H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis keenam a (H-6a) yang artinya AUDIT tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *discretionary accrual* dan hubungan negatif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan pengawasan Bapepam kepada Auditor dalam pelaksanaan auditnya terhadap perusahaan publik. Hubungan negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas audit maka perusahaan akan melaporkan tingkat akrual diskresioner yang rendah. Untuk model 2 (*deferred tax*) nilai tingkat signifikan $0,341 > 0,05$. Dengan demikian, secara parsial H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis keenam b (H-6b) ditolak yang artinya AUDIT tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *deferred tax* dan hubungannya positif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan pengawasan Bapepam kepada Auditor dalam pelaksanaan auditnya terhadap perusahaan publik.

e. Pertumbuhan (GROWTH)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh untuk model 1 (*discretionary accrual*) nilai tingkat signifikan $0,97 > 0,05$. Dengan demikian, secara parsial H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis ketujuh a (H-7a) yang artinya GROWTH tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *discretionary accrual* dan hubungan yang positif. Untuk model 2 (*deferred tax*) tingkat signifikan $0,957 > 0,05$. Dengan demikian, secara parsial H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis ketujuh b (H-7b) yang artinya GROWTH tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *deferred tax* dan hubungan yang positif. Hasil yang tidak

signifikan, kemungkinan disebabkan oleh manajemen laba melalui akrual dan *deferred tax* yang diakibatkan oleh pertumbuhan perusahaan akan dapat mudah dideteksi sehingga manajemen perusahaan publik cenderung berhati-hati dalam melakukan manajemen laba.

f. Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh untuk model 1 (*discretionary accrual*) nilai tingkat signifikan $0,265 > 0,05$. Dengan demikian, secara parsial H_0 diterima dan H_a ditolak dari hipotesis kedelapan a (H-8a) ditolak yang artinya ROA tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *discretionary accrual* dan hubungan negatif. Hasil yang tidak signifikan, kemungkinan disebabkan oleh manajer perusahaan publik berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. Untuk model 2 (*deferred tax*) nilai tingkat signifikan $0,038 < 0,05$. Dengan demikian, secara parsial H_0 ditolak dan H_a diterima dari hipotesis kedelapan b (H-8b) diterima yang artinya ROA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *deferred tax* dan hubungan negatif. Hasil yang ini memberikan bukti empiris bahwa manajer perusahaan publik dapat melakukan manajemen laba melalui *deferred tax* untuk mencapai target profitabilitas perusahaan setelah pajak.

3. Uji Global

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS pada model regresi 1 (*discretionary accruals*) terlihat bahwa pada tabel signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan

demikian H-2a diterima bahwa variabel Insentif Pajak (YD2009TAXPLAN dan YD2010TAXPLAN), *Earnings pressure* (EPRESS), tingkat utang (DEBT), kualitas *auditor* (AUDIT), pertumbuhan (GROWTH) dan profitabilitas (ROA) secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*. Temuan ini mengindikasikan bahwa insentif dan non insentif pajak dapat secara bersama-sama mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan manajemen laba melalui rekayasa akrual. Namun beberapa variabel penelitian tidak berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*. Setelah banyak kasus rekayasa laporan keuangan yang terjadi di Indonesia, Bapepam semakin meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan publik. Hal tersebutlah yang kemungkinan menyebabkan manajemen perusahaan publik lebih berhati-hati dalam melakukan rekayasa akrual untuk mempengaruhi laba perusahaan. Karena rekayasa yang mencolok akan mudah dideteksi dan mendapatkan pemeriksaan dari Bapepam sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terancam.

Selanjutnya model regresi 2 (*deferred tax*) terlihat bahwa variabel Insentif Pajak (YD2009TAXPLAN dan YD2010TAXPLAN), *Earnings pressure* (EPRESS), tingkat utang (DEBT), kualitas *auditor* (AUDIT), pertumbuhan (GROWTH) dan profitabilitas (ROA) secara simultan bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax* pada $\alpha = 5\%$ karena nilai pada tabel signifikansi $0,054 > 0,05$ namun signifikan pada $\alpha = 10\%$ karena nilai pada tabel signifikansi $0,054 < 0,10$. Dengan demikian H-2b diterima pada taraf signifikansi 10 %. Temuan ini

mengindikasikan bahwa insentif dan non insentif pajak dapat secara bersama-sama mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan manajemen laba melalui *deferred tax*. Penelitian ini memberikan hasil bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya manajemen laba secara bersama dapat menjelaskan variabel *deferred tax*.

Tabel 4.16.a
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.458	7	.065	4.026	.000 ^a
	Residual	3.183	196	.016		
	Total	3.641	203			

a. Predictors: (Constant), ROA, YD2009TAXPLAN, YD2010TAXPLAN, GROWTH, DEBT, AUDIT, EPRESS

b. Dependent Variable: DA

Sumber: Lampiran 5.f.

Tabel 4.16.b.
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.000	7	.000	2.023	.054 ^a
	Residual	.005	193	.000		
	Total	.006	200			

a. Predictors: (Constant), ROA, YD2009TAXPLAN, YD2010TAXPLAN, GROWTH, DEBT, AUDIT, EPRESS

b. Dependent Variable: DT

Sumber: Lampiran 5.h.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bab ini memaparkan kesimpulan, keterbatasan dan impikasi hasil penelitian. Bagian awal menguraikan kesimpulan hasil penelitian praktik *earnings management* atas perubahan tarif PPh badan UU No 36 tahun 2008 dan hasil pengujian faktor insentif dan non insentif pajak terhadap *earnings management*. Pembahasan ini merupakan konfirmasi dari landasan teori. Bagian selanjutnya menyajikan keterbatasan dan implikasi penelitian.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari uji hasil beda atas *discretionary accrual* dan *deferred tax* menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan *discretionary accrual* dan *deferred tax* sebelum dan sesudah perubahan UU PPh ditolak. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba sebagai respon perubahan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan di Indonesia.
2. Dari hasil uji regresi linier berganda yang dilakukan serentak selama 4 tahun, menunjukkan bahwa variabel insentif dan non insentif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual* dengan *adjusted R Square* (R^2) senilai 9,40 % yang berarti variabel independen hanya dapat menjelaskan

variasi yang terdapat dalam variabel dependen sebesar 9,40 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan. Dari beberapa variabel tersebut, secara parsial hanya satu variabel yaitu EPRESS yang berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*. Hasil yang signifikan memberikan bukti empiris yang menunjukkan bahwa manajer perusahaan publik cenderung melakukan “*big bath*” (meninggikan beban restrukturisasi) dimana perusahaan akan melaporkan rugi diskresioner dan akrual pada periode yang sama ketika laba periode berjalannya negatif dan lebih rendah dari laba periode sebelumnya. Hasil ini konsisten dengan temuan Subagyo dan Oktavia (2010), Yin dan Cheng (2004).

3. Dari hasil uji regresi linier berganda yang dilakukan serentak selama 4 tahun, menunjukkan bahwa variabel insentif dan non insentif pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax* pada $\alpha = 5\%$ namun signifikan pada $\alpha = 10\%$ dengan *adjusted R Square* (R^2) senilai 3,50 % yang berarti variabel independen hanya dapat menjelaskan variasi yang terdapat dalam variabel dependen sebesar 3,50 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya manajemen laba secara bersama dapat menjelaskan variabel *deferred tax*. Dari beberapa variabel tersebut, secara parsial tiga variabel yaitu EPRESS, DEBT dan ROA yang berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*.

5.2. Keterbatasan

Ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini masih kecil.
2. Penelitian ini tidak memasukan industri jasa keuangan sehingga hasil didapat tidak dapat digeneralisir pada semua industri.
3. Hanya menggunakan satu variabel pengukuran insentif pajak saja yaitu perencanaan pajak (*tax planning*).
4. Pengukuran variabel *deferred tax* dalam penelitian ini menganggap seluruh *deferred tax* sebagai komponen diskresioner. Pada kenyataannya terdapat kemungkinan ada sebagian *deferred tax* yang merupakan akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Karenanya pengelompokan keseluruhan *deferred tax* sebagai komponen diskresioner akan menimbulkan bias dalam hasil penelitian.
5. Identifikasi faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi manajemen laba terbatas hanya pada faktor-faktor insentif dan non insentif pajak yang digunakan dalam model manajemen laba. Dengan demikian tidak terlepas kemungkinan adanya faktor-faktor lain di luar yang digunakan dalam model ini yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

5.3. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa faktor-faktor insentif dan non insentif pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *earnings management* melalui *discretionary accruals*. Artinya faktor-faktor insentif dan non insentif pajak secara bersama-sama dapat digunakan sebagai signal dalam melakukan manajemen laba melalui *discretionary accruals*. Selanjutnya, secara global faktor-faktor insentif dan non insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap *earnings management* melalui *deferred tax*. Artinya faktor-faktor insentif pajak dan insentif non pajak secara bersama-sama dapat digunakan sebagai signal dalam melakukan manajemen laba melalui *deferred tax*. Temuan uji beda konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu Guenther (1994), Setiawati (2000) dan Hidayati dan Zulaikah (2003). Namun, temuan uji beda tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu Wulandari dkk (2004).

Penelitian selanjutnya dapat memperbaiki penelitian ini berdasarkan keterbatasan di atas.

1. Perlu dilakukan penambahan sampel dan dapat dicoba untuk meneliti perusahaan di sektor usaha tertentu.
2. Penggunaan perencanaan pajak sebagai proksi insentif pajak dapat diperluas dengan menggunakan insentif pajak lainnya.
3. Penggunaan *deferred tax* dalam menjelaskan fenomena manajemen laba belum dilakukan di Indonesia sebelumnya, karenanya perlu dilakukan penyempurnaan

model, misalnya dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besaran *deferred tax* tadi sehingga dapat dikelompokkan sebagai komponen diskresioner dan non diskresioner.

4. Penelitian dilakukan terhadap sektor usaha tertentu (sebagai proksi motivasi *earnings management* yang tetap) dengan data *time series* untuk mengetahui apakah koefisien R^2 meningkat dengan cara ini.
5. Pada penelitian selanjutnya perlu diidentifikasi lebih rinci mengenai faktor-faktor yang digunakan dalam menguji model terbaik sebagai pengukur manajemen laba. Penentuan faktor-faktor ini sebaiknya dikaitkan dengan tujuan (motivasi-motivasi) manajemen laba tertentu yang ingin diteliti dalam penelitian yang dilakukan tersebut (Scott, 2003). Sebagai contoh, untuk perusahaan yang dianggap melakukan manajemen laba untuk menghindari default, faktor-faktor yang digunakan adalah yang terkait dengan kondisi likuiditas perusahaan. Pada model *deferred tax* (DT), perlu dikaitkan dengan instrument *deferred tax* seperti penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, biaya manfaat pensiun, metode penilaian persediaan dan lain-lain yang mempengaruhi nilai *deferred tax* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua, 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI-Press.
- Benish, Messod D., 1999. The Detection of Earnings Manipulation. Working Papers. Indiana University, Kelley School of Business. Diakses dari <http://www.bauer.uh.edu/swhisenant/benish%20earnings%20mgmt%20score.pdf>
- Boynton, Charles E., Dobbins, Paul S. and George A. Plesko, 1992. Earnings Management and the Corporate Alternative Minimum Tax, *Journal of Accounting Research*. 30.
- Buckley, J.W.; M.H. Buckley; dan Hung-Fu Chiang. 1976. *Research Methodology & Business Decisions*. National Association of Accountants, New York. Hal. 11-50
- Burgsahler, David C., and Ilia D. Dichev, 1997. Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses. *Journal of Accounting and Economics*, vol 24, pp. 99-126.
- Dechow, P., Sloan, R., dan Sweeney, A, 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*. 70 (2) : 193 – 225.
- Dechow, P., and Skinner, Douglas J, 2000. Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. *Accounting Horizons*; Jun 2000.
- Dechow, P., S. Richardson, and I. Tuna, 2003. “Why Are Earnings Kinky? An Examination of the Earnings Management Explanation”. *Review of Accounting Studies*, vol 8 (2003), pp. 355 – 384.
- Desai, Mihir A. Earnings Management and Corporate Tax Shelters. Diakses dari <http://www.people.hbs.edu/mdesai/EarningsMngmtCTA.pdf>
- Djunaedi, Achmad, 2000. Paradigma Penelitian. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian. Program Pascasarjana Universitas Gajahmada. <http://mpkd.ugm.ac.id/weblama/homepageadj/support/materi/metlit-i/a02-metlit-ragam-lit.pdf>
- Faisal, 2003. *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Syah Kuala* Vol.5 No.2 Mei: 133-152.

- Frankel, Micah, and Robert Trezervant, 1994. The Year End LIFO Inventory purchasing Decision : An Empirical Test. *Accounting Review* . April . Page 382-398.
- Ghozali, Imam, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greene, William H. 2010. *Econometric Analysis*. Seventh Edition. New York: Pearson Education, Inc.
- Guenther, David A., 1994. Earnings Management in Response o Corporate Tax Rate Changes : Evidence from 1986 Tax Reform Act. *Accounting Review*. January, 230–243.
- Gujarati, Damodor N, 1997. *Ekonometrika Dasar*. Zain, Surmano (Penerjemah). Cetakan Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodor N, 2004. *Basic Econometrics*. Fourth Edition. The McGraw-Hill Companies.
- Gumanti, Tatang Ary, 2000, Earnings Management: *Suatu Telaah Pustaka*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 104 – 115
- _____, 2003. *Motivasi di Balik Earnings Management*. *Usahawan* No.12 Th. XXXII Desember: 21-26.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2008. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 10. Penerbit PT. Raja Garfindo, Jakarta.
- Healy, P. M., 1985. The Effect of Bonus Scheme on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics* 7 (1-3) : 85 – 107.
- Hidayati, Siti Munfiah, dan Zulaikha, 2003. *Analisis Perilaku Earning Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya, 16-17 Oktober 2003.
- Holland, K and R. H G. Jackson, 2002. Earnings Management and Deferred Tax. Diakses dari <http://ssrn.com/abstract=327220>.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1997. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

- _____, 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Indiantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Insukindro, 1998. Sindrum R^2 dalam Analisis Regresi Linier Runtun Waktu. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Oktober 1998, Vol. 13, No. 4, 1-11.
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling, 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Diakses dari <http://papers.ssrn.com/abstract=94043>
- Jones, J., 1991. Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*. Page 193-228.
- Joni dan Jogiyanto H.M., 2008. *Hubungan Manajemen Laba Sebelum IPO dan Return Saham dengan Kecerdasan Investor sebagai Variabel Pemoderasi*. Simposium Nasional Akuntansi XI: Pontianak, 23-24 Juli 2008.
- Joni, Eddy, 2006. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Earnings Management pada Perusahaan Perbankan (Sehat dan Sakit) di Bursa Efek Jakarta*. Skripsi. Indralaya. Indonesia: Universitas Sriwijaya.
- Meutia, Inten, 2004. *Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba untuk KAP Big 5 dan Non Big 5*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 7, N0.3, September 2004: Hal. 333-350.
- McNichols, M.F., 2000. Research Design Issues in Earnings Management Studies. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol 19, pp. 313-345
- Phillips, J., M. Pincus and S. O. Rego, 2003. Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense. *The Accounting Review* Vol. 78. No. 2 (April): 491-521.
- Purba, Marisi P., dan Andreas, 2005. *Akuntansi Pajak Penghasilan : Berdasarkan IAS No. 11 dan PSAK No. 46*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Santoso, Singgih, 1999. *SPSS Mengolah Data Statistik secara Profesional*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

- Scott, William R., 2003. *Financial Accounting Theory*. Third Edition. Toronto, Ontario. Pearson Education Canada Inc.
- Setiawati, Lilis dan Ainun Na'im, 2000. *Manajemen Laba*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Oktober. Hal 424-441
- _____, 2001. Bank Health Evaluation by Bank Indonesia and Earnings Management in Banking Industry. *Gadjah Mada International Journal of Business* Vol. 3, No. 2 May: 159-176.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. 1982. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Stice, Earl K, James D. Stice, dan K. Fred Skousen, 2004. *Akuntansi Intermediate*. Edisi 15. Buku 1. Nicodemus, Barlev (editor). Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo dan Oktavia, 2010. *Manajemen Laba sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.
- Sularso, Sri, 2003. *Metodologi Penelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Swieten, Corry van, 2011. Do sustainable and non-sustainable companies differ in their extent of earnings management? Diakses dari <http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/3613/1/MWCvSwietenjanuari2011.pdf>
- Teoh , S. H. , T. J . Wong, and G. Rao,1998. Are Accruals during Initial Public Offerings Opportunistic ? *Review of Accounting Studies* 3,p175-208.
- Undang-Undang Perpajakan Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Utari, Dewi, 2007. *Analisa Hubungan Antara Beban Pajak Tangguhan Dengan Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta)*. Tesis. Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia.
- Watts, Ross L., and Jerold L. Zimmerman, 1986. *Positive Accounting Theory*. Newyork: Prentice Hall.

- Wiryardari, Santi Aryn dan Yulianti, 2009. *Hubungan Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Pajak dengan Perilaku Manajemen Laba dan Persistensi Laba*. Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang 2009.
- Wulandari, Dewi, Kumalahadi dan Janur Eko Prasetyo, 2004. *Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-Undang Perpajakan 2000 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar Bali : 883 – 896.
- Yin, Jennifer, and Agnes Cheng, 2004. Earnings Management of Profit Firms and Loss Firms in Response to Tax Rate Reductions. *Review of Accounting and Finance* volume 3. 2004: 67 – 92.
- Yulianti, 2004. *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba*. Tesis. Depok, Indonesia: Universitas Indonesia.
- _____, 2004. *Kemampuan Beban pajak Tangguhan dalam Memprediksi Manajemen Laba*. Simposium Nasional Akuntansi VII (Bali).
- Zhang, Huai, 2002. Detecting Earnings Management-Evidence from Rounding-up in Reported EPS. Working Paper. University of Illinois at Chicago.